PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

bapenda Jabar
Menembus putaran waktu dengan inovasi

LKIP 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 528 Telp (022) 7566197-7568928
Fax: (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail :
bapenda@jabarprov.go.id
Bandung 40286

DAFTAR ISI

IHTISAR EXECUTIVE…… i

KATA PENGANTAR …… iv

BAB I

PENDAHULUAN ……..... 1

1. 1 Latar Belakang …….. 1

1. 2 Tujuan Penulisan……, ... 2

1. 3 Landasan Hukum 2

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 3

1. 5 Sistematika Penulisan 11

BAB II..... 12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 12

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 19

2.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan 20

BAB III..... 57

AKUNTABILITAS KINERJA 57

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 57

3.2 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 58

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 63

3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 64

3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 65

3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 67

3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,..... 90

BAB IV 91

PENUTUP 91

LAMPIRAN

- Pernyataan Telah Direviu
- Perjanjian Kinerja
- Indikator Kinerja Utama
- SK Tim Penyusun LKIP
- Mekanisme Pengumpulan Data LKIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LKIP Tahun 2019 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja tahun 2019 atau tahun pertama karena tahun 2018 merupakan tahun masa transisi atara Renstra 2013 – 2018 dan Renstra Tahun 2018 – 2023 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018 – 2023, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2010 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 2 (dua sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 775.885.633.988,00 dengan realisasi sebesar Rp. 728.777.315.442,00 (93,93%) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	341.204.880.696,00	306.669.623.111,00	89,88
Belanja Tidak Langsung	434.680.753.292,00	422.107.692.331,00	97,11
Total Biaya	775.885.633.988,00	728.777.315.442,00	93,93

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut yang kedelapan kali pada tahun 2019.

Dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, 28 Februari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 0008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memuat informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 0008

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. 3 Landasan Hukum

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Surat Sekretariat Daerah Jawa Barat Nomor 061/92/Org Tanggal 09 Januari 2020 Perihal Penyusunan SAKIP PD.

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendapatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
    a. Subbagian Kepegawaian
    b. Subbagian Keuangan dan Aset
    c. Subbagian Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
    a. Subbidang Regulasi dan Kerjasama
    b. Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan
    c. Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja
4. Bidang Pendapatan I
    a. Subbidang Pendapatan dan Penetapan
    b. Subbidang Layanan dan Keberatan
    c. Subbidang Pembukuan dan Penagihan
5. Bidang Pendapatan II
    a. Subbidang Pendataan dan Penerimaan I
    b. Subbidang Pendataan dan Penerimaan II
    c. Subbidang Pendataan dan Penerimaan III
6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
    a. Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan
    b. Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian
    c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagi berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Sumber : bapenda.jabarprov.go.id)

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S.1 sebanyak 360 orang (42.45%), SLTA sebanyak 241 orang (28.42%), S.2 sebanyak 187 orang (22.05%), D.III sebanyak 29 orang (3.42%), SMP sebanyak 15 orang (1.77%), SD sebanyak 13 orang (1.53%) dan S.3 sebanyak 3 orang (0.35%).

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pejabat Struktural	161 orang	19.49%
2.	Pejabat Fungsional : Arsiparis	4 orang	0.48%
3.	Pelaksana	661 orang	80.02%
	Total	**826 orang**	100,00%

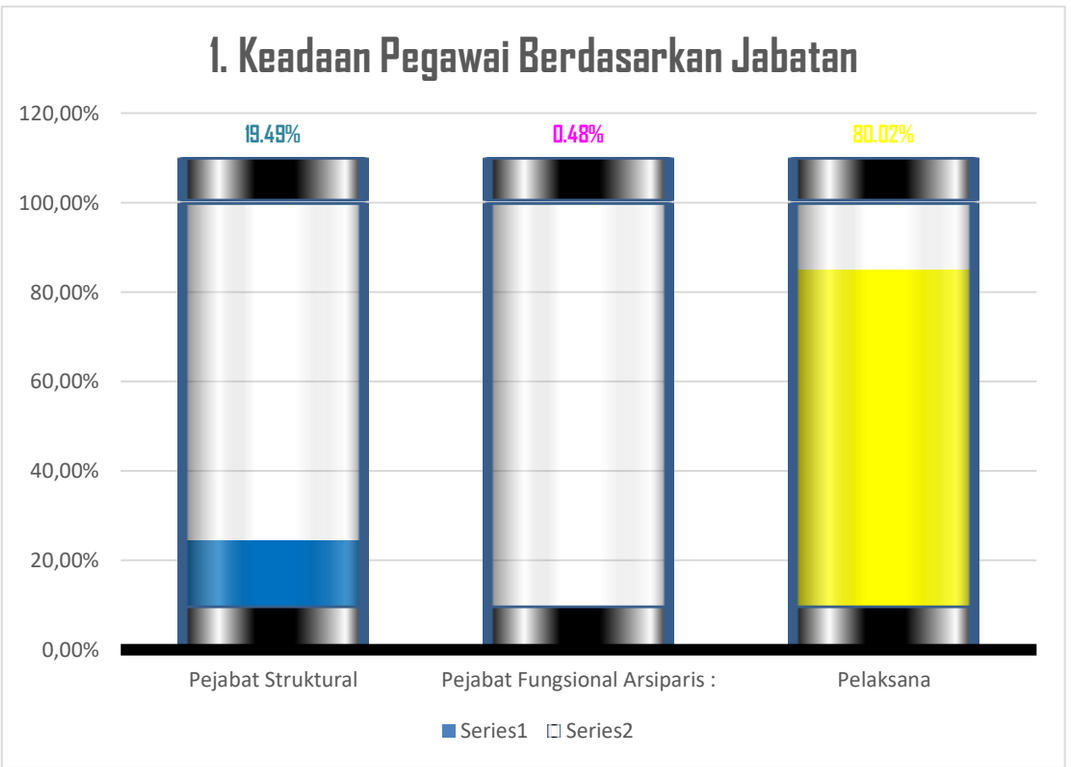

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Stata-3	6	0.73%
2.	Stata-2	200	24.21%
3.	Strata-1	337	40.80%
4.	Diploma 4	9	1.09%
5.	Diploma 3	31	3.75%
6.	Diploma 2	0	0.00%
7.	Diploma 1	0	0.00%
8.	SMA	1	0.12%
9.	SMK	215	26.03%
10.	SMP	14	1.69%
11.	Sekolah Dasar	13	1.57%
12.	Jumlah	826	100%

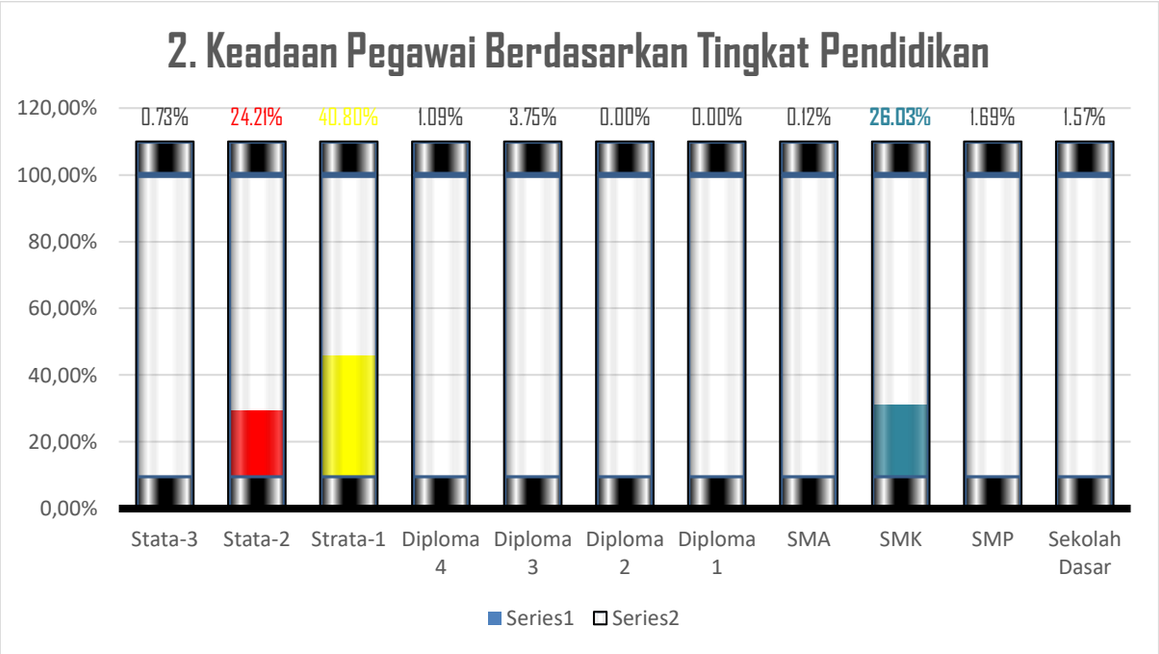

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pria	643	77.85%
2.	Wanita	183	22.15%
	Jumlah	826	100,00%

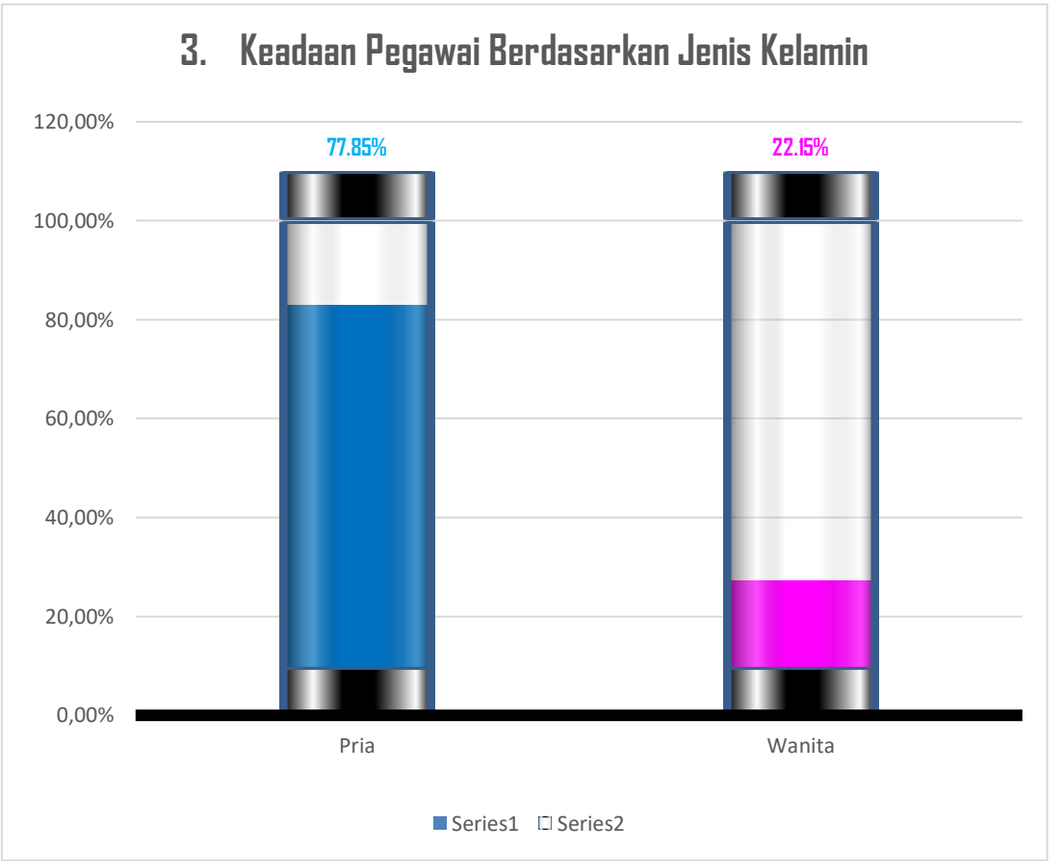

4. Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Golongan I	17	2.06%
2.	Golongan II	170	20.58%
3.	Golongan III	541	65.50%
4.	Golongan IV	98	11.86%
	Jumlah	826	100.00%

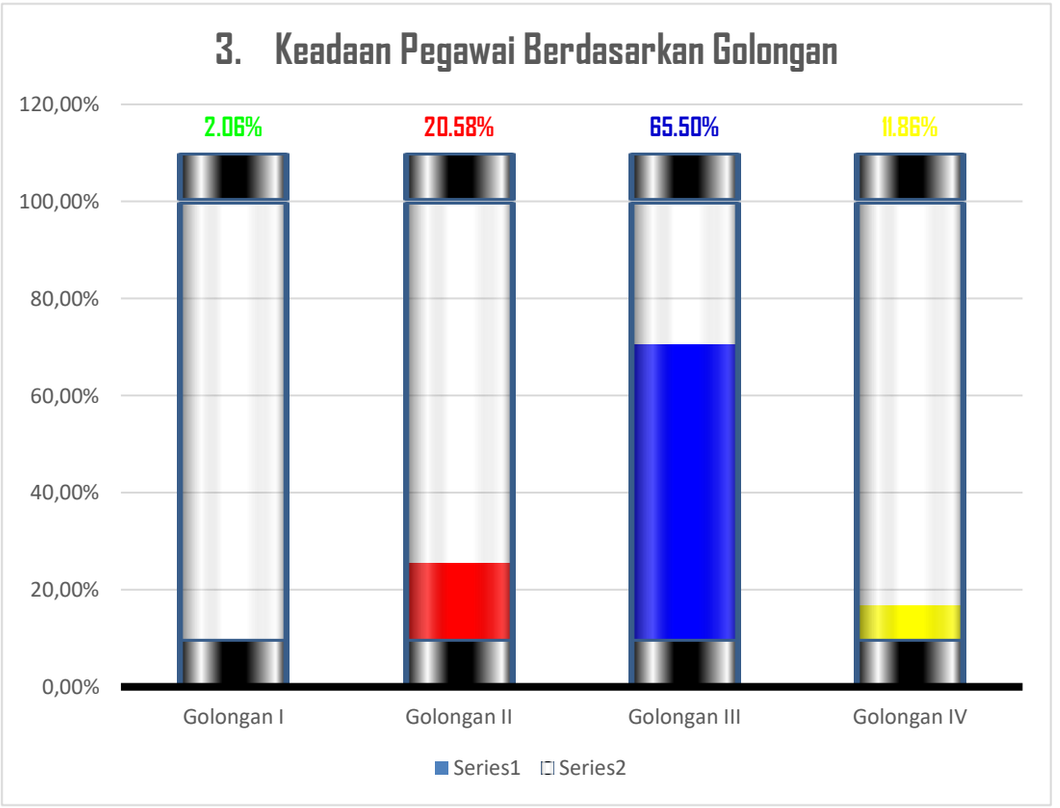

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1	16 sd 20 Tahun	0	0.00%
2	21 sd 25 Tahun	2	0.24%
3	26 sd 30 Tahun	10	1.21%
4	31 sd 35 Tahun	45	5.45%
5	36 sd 40 Tahun	77	9.32%
6	41 sd 45 Tahun	143	17.31%
7	46 sd 50 Tahun	217	26.27%
8	51 sd 55 Tahun	241	29.18%
9	56 sd 60 Tahun	91	11.02%
10	61 sd 65 Tahun	0	0.00%
11	> 65 Tahun	0	0.00%
	Jumlah	826	100.00%

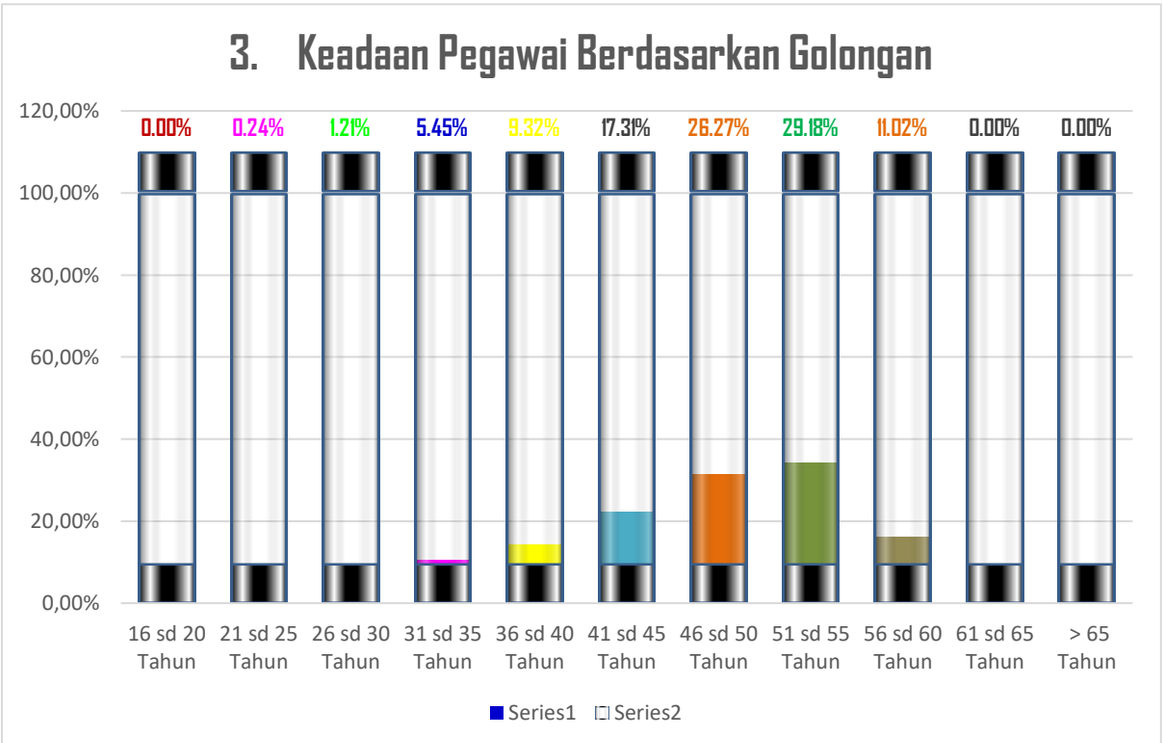

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
    1. Capaian Kinerja Organisasi
    2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019
    3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
    4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
    5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
    6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
    7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses adalah pendekatan politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penelaahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan Provinsi Jawa Barat sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 yang telah dijabarkan kedalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut memiliki makna sebagai berikut:

• ***Jawa Barat Juara Lahir Batin***: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

• ***Inovasi***: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

• ***Kolaborasi***: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Memb**entuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban;
2. Mel**ahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Me**mpercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;

4. Me**ningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan;
5. Me**wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1.1 Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tugas Pokok Bapenda	Visi RPJMD	Misi ke-5	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mewujudkan *Good Governance* dan *Whole of Government*	Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan

isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

"*Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel*"

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Terwujudnya: menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Tata Kelola Pendapatan Daerah: tata cara pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Makin: kian bertambah. Menunjukkan semangat untuk mencapai kinerja yang berkemajuan, terutama untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2018 berada di angka 3,150 poin.

Efektif: mangkus/berhasil guna, untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Andal: dapat dipercaya. Tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap instansi pemerintah, karena instansi pemerintah masih identik dengan kumpulan birokrat yang ingin dilayani bukan melayani, pelayanan yang masih lamban, prosedur yang berbelit-belit dan aparatur yang tidak profesional bahkan cenderung koruptif. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berpotensi menjadikan masyarakat resisten terhadap kewajiban perpajakan. Karena itu, untuk mengubah persepsi negatif masyarakat, instansi pemerintah harus mampu menjalankan agenda reformasi birokrasi secara optimal, antara lain dalam sektor pelayanan publik yang harus berorientasi kepada *customer satisfaction* (kepuasan masyarakat pengguna layanan), dengan cara menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai manifestasi dari paradigma "birokrasi yang melayani". Pada saat yang sama, untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah harus terbuka (transparan) dengan cara menyediakan informasi publik serta menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan melalui kanal-kanal informasi, baik media massa, media luar ruang, maupun *platform* media sosial.

Sasaran

Dengan hadirnya birokrasi yang melayani dan transparan itulah, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sehingga pada gilirannya terbangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai

dengan peran dan kapasitasnya masing-masing, antara lain kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat prosedur.

Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan itulah, mutlak hadirnya spirit ilahiah selain mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 56,22 persen, dan ditargetkan pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah bisa mencapai 61,59 persen.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

Salah satu cara mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui survey kepuasan masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Terdapat 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2018-2023 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik, meliputi: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan; Waktu Penyelesaian pelayanan; Biaya/Tarif pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana atau Aplikasi pelayanan; Perilaku Pelaksana atau Aplikasi pelayanan; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana pelayanan.
4. Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja serta kompetensi dan kinerja aparatur.

2. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah Kebijakan:

1. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, terutama yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU);

2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
3. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan;
4. Mendorong kepemilikan SIPPA bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan air permukaan;
5. Mengoptimalkan layanan pajak daerah menuju *zero complain*;
6. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor;
7. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
8. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Perimbangan;
9. Memastikan semua Badan Usaha PBBKB yang ada di Jawa Barat menjadi Wajib Pungut;
10. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD;
11. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
12. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pelayanan;
13. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Berbasis *Mobile Sistem*.

Strategi 2: Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik.

Arah Kebijakan:

1. Melakukan simplifikasi dan perbaikan terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna layanan; Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang berlaku;
2. Membangun maklumat pelayanan yang memuat komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima;
3. Memberikan jaminan kepastian serta transparansi waktu dan biaya pelayanan; Meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* aparatur pemberi layanan;
4. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi;
5. Mengoptimalkan penanganan atas pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat;
6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk kenyamanan masyarakat pengguna layanan;
7. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Strategi 3: Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.

Arah Kebijakan:

1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Strategis;
2. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Kerja;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja;

5. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah;

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019.

Tabel Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	57,52 persen
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	82,80 poin

Didukung oleh 4 (empat) program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	27.779.507.852	APBD
2.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	6.582.840.341	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	119.433.065.457	APBD
4.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah	187.409.467.046	APBD
Jumlah		**Rp. 341.204.880.696**	

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 berikut anggaran yang tersedia untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 2 Sasaran Strategis ditetapkan 2 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

1.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 4 (empat) Program dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
	3.02.02.177.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**27.779.507.852**	**25.705.244.971**	**92.53**
1	3.02.02.177.001	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	439.261.000	438.257.572	99.77
2	3.02.02.177.002	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	454.604.000	448.465.819	98.65
3	3.02.02.177.003	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	522.151.000	409.773.000	78.48
4	3.02.02.177.004	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	448.090.000	444.885.500	99.28
5	3.02.02.177.005	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	449.869.373	445.289.600	98.98
6	3.02.02.177.006	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	448.296.650	418.913.000	93.45
7	3.02.02.177.007	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	241.606.000	222.620.000	92.14
8	3.02.02.177.008	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	444.317.000	430.327.000	96.85
9	3.02.02.177.009	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	493.659.280	460.898.300	93.36
10	3.02.02.177.010	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	471.678.000	452.377.500	95.91
11	3.02.02.177.011	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wiliyah Kabupaten Karawang	424.280.000	389.150.000	91.72
12	3.02.02.177.012	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pedapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	414.475.000	413.975.000	99.88
13	3.02.02.177.013	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	417.235.000	417.035.000	99.95

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
14	3.02.02.177.014	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	415.624.000	395.681.500	95.20
15	3.02.02.177.015	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	404.218.000	396.243.000	98.03
16	3.02.02.177.016	Kegiatan Intensifikasi Pemunggutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	452.120.000	408.670.000	90.39
17	3.02.02.177.017	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	446.674.000	433.720.000	97.10
18	3.02.02.177.018	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	437.735.000	393.995.000	90.01
19	3.02.02.177.019	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	411.792.000	377.029.500	91.56
20	3.02.02.177.020	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	413.589.000	388.039.000	93.82
21	3.02.02.177.021	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	487.675.000	446.675.000	91.59
22	3.02.02.177.022	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	457.870.000	453.592.000	99.07
23	3.02.02.177.023	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	570.133.500	562.961.500	98.74
24	3.02.02.177.024	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	431.288.000	420.248.000	97.44
25	3.02.02.177.025	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	429.228.000	409.478.000	95.40
26	3.02.02.177.026	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	494.468.000	490.668.000	99.23
27	3.02.02.177.027	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	420.090.000	407.250.000	96.94

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
28	3.02.02.177.028	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	452.887.000	410.604.980	90.66
29	3.02.02.177.029	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	411.210.000	395.250.000	96.12
30	3.02.02.177.030	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	617.077.000	533.974.000	86.53
31	3.02.02.177.031	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	422.279.000	394.281.000	93.37
32	3.02.02.177.032	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	441.623.000	406.164.000	91.97
33	3.02.02.177.033	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	373.230.100	364.006.500	97.53
34	3.02.02.177.034	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	386.100.000	379.030.000	98.17
35	3.02.02.177.035	Kegiatan Rapat Kerja Pendapatan Daerah	948.226.286	809.328.500	85.35
36	3.02.02.177.036	Kegiatan Sosialisasi Dan Monitoring Pajak Daerah	586.399.950	549.461.575	93.70
37	3.02.02.177.037	Kegiatan Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Wilayah Jawa Barat	805.674.963	737.590.850	91.55
38	3.02.02.177.038	Kegiatan Intensifikasi Pbbkb Dan Lain-Lain Pad Yang Sah	332.897.500	295.239.370	88.69
39	3.02.02.177.039	Kegiatan Intensifikasi/Ekstensifikasi Pendapatan Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	337.283.300	335.886.800	99.59
40	3.02.02.177.040	Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Dan Pendataan Pajak Rokok, Dana Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	425.950.800	425.862.550	99.98
41	3.02.02.177.041	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	394.330.000	286.426.500	72.64

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
42	3.02.02.177.042	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	215.750.000	214.000.000	99.19
43	3.02.02.177.043	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	308.148.000	240.449.900	78.03
44	3.02.02.177.044	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	272.560.000	271.122.800	99.47
45	3.02.02.177.045	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	132.040.000	132.040.000	100.00
46	3.02.02.177.046	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	307.850.000	276.880.000	89.94
47	3.02.02.177.047	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	226.492.000	221.540.000	97.81
48	3.02.02.177.048	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	130.680.000	103.000.000	78.82
49	3.02.02.177.049	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	532.120.000	499.720.000	93.91
50	3.02.02.177.050	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	559.500.000	465.917.400	83.27
51	3.02.02.177.051	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	408.600.000	227.620.000	55.71
52	3.02.02.177.052	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	307.250.000	303.388.000	98.74
53	3.02.02.177.053	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	297.800.000	296.200.000	99.46
54	3.02.02.177.054	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	112.282.750	101.750.000	90.62
55	3.02.02.177.055	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	309.691.700	290.670.150	93.86

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
56	3.02.02.177.056	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	194.327.500	161.489.525	83.10
57	3.02.02.177.057	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	277.550.000	168.848.000	60.84
58	3.02.02.177.058	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	170.300.000	158.250.000	92.92
59	3.02.02.177.059	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	257.400.000	253.035.000	98.30
60	3.02.02.177.060	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	277.450.000	256.641.000	92.50
61	3.02.02.177.061	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	301.090.000	279.168.400	92.72
62	3.02.02.177.062	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	309.500.000	296.000.000	95.64
63	3.02.02.177.063	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	335.805.800	329.406.480	98.09
64	3.02.02.177.064	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	357.575.000	278.679.600	77.94
65	3.02.02.177.065	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	358.100.000	357.800.000	99.92
66	3.02.02.177.066	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	358.150.000	337.970.000	94.37
67	3.02.02.177.067	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	257.300.000	213.692.000	83.05
68	3.02.02.177.068	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	307.820.000	305.034.600	99.10
69	3.02.02.177.069	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	188.650.000	181.380.000	96.15

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
70	3.02.02.177.070	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	237.400.000	218.410.000	92.00
71	3.02.02.177.071	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	237.200.000	226.700.000	95.57
72	3.02.02.177.072	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	138.850.000	122.850.000	88.48
73	3.02.02.177.073	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	145.279.400	144.467.700	99.44
74	3.02.02.177.074	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	71.800.000	71.800.000	100.00
	3.02.02.178.	**Program Penyusunan Rencana, Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah**	**6.582.840.341**	**6.216.720.592**	**94.44**
75	3.02.02.178.001	Kegiatan Dokumen Kinerja Tahunan	597.629.880	578.390.650	96.78
76	3.02.02.178.002	Kegiatan Monitoring Pembinaan Dan Kepatuhan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	53.760.000	53.152.250	98.87
77	3.02.02.178.003	Kegiatan Pemeriksaan, Pemutahiran Dan Pendampingan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	1.283.599.220	1.283.347.600	99.98
78	3.02.02.178.004	Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	485.848.661	479.135.586	98.62
79	3.02.02.178.005	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Switching E-Samsat	59.524.829	57.630.100	96.82
80	3.02.02.178.006	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Samsat Online Sentralisasi (Ssos) Dengan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (Siak)	86.524.804	83.684.400	96.72
81	3.02.02.178.007	Kegiatan Penyusunan Integrasi Sistem Samsat Online Sentralisasi (Ssos) Dengan Dirjen Pajak	86.524.889	84.187.800	97.30
82	3.02.02.178.008	Kegiatan Pengembangan Ktp Elektronik Berbasis Mobile System	86.524.885	83.678.300	96.71

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
83	3.02.02.178.009	Kegiatan Penyusunan Aplikasi Penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor (AP2KB) Berbasis Mobile Sistem	110.399.909	100.518.800	91.05
84	3.02.02.178.010	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Pendapatan Terpadu (Sipandu)	86.524.882	83.797.000	96.85
85	3.02.02.178.011	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pendapatan Dengan Instansi Vertikal/Horizontal	86.524.950	82.743.800	95.63
86	3.02.02.178.012	Kegiatan Teknik Penerapan Tik Pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	95.499.946	87.991.800	92.14
87	3.02.02.178.013	Kegiatan Pengembangan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan	1.178.368.750	1.102.138.950	93.53
88	3.02.02.178.014	Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara)	86.524.804	83.964.600	97.04
89	3.02.02.178.015	Kegiatan Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat	1.594.080.000	1.425.937.250	89.45
90	3.02.02.178.016	Kegiatan Pengembangan Regulasi Dan Kerjasama Pendapatan	604.979.932	546.421.706	90.32
	3.02.02.179.	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah**	**119.433.065.457**	**112.231.508.610**	**93.97**
91	3.02.02.179.001	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	39.958.144.159	37.786.499.990	94.57
92	3.02.02.179.002	Kegiatan Penataan Sarana Penunjang Kantor Badan Pendapatan Daeah Provinsi Jawa Barat	13.128.980.608	12.225.856.955	93.12
93	3.02.02.179.003	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	389.039.634	371.669.000	95.53
94	3.02.02.179.004	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	398.539.364	376.008.990	94.35
95	3.02.02.179.005	Kegiatan Pengadaan Rumah Dinas/Mess Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	4.236.000.000	3.909.922.000	92.30

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
96	3.02.02.179.006	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	3.620.025.912	3.317.149.702	91.63
97	3.02.02.179.007	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	118.092.335	116.630.000	98.76
98	3.02.02.179.008	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	80.300.000	74.700.000	93.03
99	3.02.02.179.009	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	997.399.974	971.081.400	97.36
100	3.02.02.179.010	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	523.990.666	493.570.510	94.19
101	3.02.02.179.011	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	841.880.000	635.558.698	75.49
102	3.02.02.179.012	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	316.582.166	310.300.000	98.02
103	3.02.02.179.013	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	19.454.519.957	18.354.652.402	94.35
104	3.02.02.179.014	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	975.008.798	942.271.000	96.64
105	3.02.02.179.015	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	35.412.270	35.280.000	99.63
106	3.02.02.179.016	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1.176.462.954	1.105.050.000	93.93
107	3.02.02.179.017	Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	892.552.140	813.280.374	91.12
108	3.02.02.179.018.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	364.099.644	347.769.516	95.51
109	3.02.02.179.019	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	873.300.000	682.417.850	78.14

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
110	3.02.02.179.020	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	293.785.574	278.957.000	94.95
111	3.02.02.179.021	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	153.519.494	151.531.000	98.70
112	3.02.02.179.022	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	211.472.856	209.341.500	98.99
113	3.02.02.179.023	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	441.374.591	432.669.530	98.03
114	3.02.02.179.024	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	2.110.488.407	2.077.074.177	98.42
115	3.02.02.179.025	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	111.545.191	108.450.000	97.23
116	3.02.02.179.026	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	390.600.000	379.987.000	97.28
117	3.02.02.179.027	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	749.039.658	680.742.806	90.88
118	3.02.02.179.028	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	456.495.347	429.031.900	93.98
119	3.02.02.179.029	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	173.870.000	171.139.000	98.43
120	3.02.02.179.030	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	59.300.000	45.547.700	76.81
121	3.02.02.179.031	Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	2.148.768.283	1.965.439.101	91.47
122	3.02.02.179.032	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	73.115.364	64.847.630	88.69
123	3.02.02.179.033	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	1.339.939.114	1.293.084.125	96.50

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
124	3.02.02.179.034	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	627.343.067	575.381.600	91.72
125	3.02.02.179.03	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	568.167.408	476.785.900	83.92
126	3.02.02.179.036	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	466.988.083	442.784.630	94.82
127	3.02.02.179.037	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	101.333.596	92.858.600	91.64
128	3.02.02.179.038	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	486.600.000	468.920.000	96.37
129	3.02.02.179.039	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap Ii Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	6.010.630.696	5.568.307.997	92.64
130	3.02.02.179.040	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	481.120.800	462.875.155	96.21
131	3.02.02.179.041	Kegiatan Pembangunan Gedung Arsip Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	1.003.510.000	851.467.286	84.85
132	3.02.02.179.042	Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (Ded) Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	714.364.770	588.492.750	82.38
133	3.02.02.179.043	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	313.389.659	304.101.200	97.04
134	3.02.02.179.044	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	582.374.667	547.372.000	93.99
135	3.02.02.179.045	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	183.645.000	180.281.000	98.17
136	3.02.02.179.046	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	42.800.000	42.200.000	98.60
137	3.02.02.179.047	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	574.074.006	525.894.500	91.61

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
138	3.02.02.179.048	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	384.618.118	361.760.000	94.06
139	3.02.02.179.049	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	790.703.000	783.463.300	99.08
140	3.02.02.179.050	Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	4.509.229.754	4.500.326.753	99.80
141	3.02.02.179.051	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	3.064.068.260	2.894.328.556	94.46
142	3.02.02.179.05	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	659.039.000	650.559.627	98.71
143	3.02.02.179.053	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	322.367.400	313.779.000	97.34
144	3.02.02.179.054	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	453.053.713	442.057.900	97.57
	3.02.02.180.	**Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah**	**187.409.467.046**	**162.516.148.938**	**86.72**
145	3.02.02.180.001	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	4.857.901.883	4.037.552.560	83.11
146	3.02.02.180.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	4.392.766.090	3.692.789.762	84.07
147	3.02.02.180.003	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.188.397.300	940.533.300	79.14
148	3.02.02.180.004	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	15.040.077.750	12.064.828.570	80.22
149	3.02.02.180.005	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	13.000.000	9.710.851	74.70
150	3.02.02.180.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	990.110.117	907.212.647	91.63

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
151	3.02.02.180.007	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	177.070.000	130.840.845	73.89
152	3.02.02.180.008	Kegiatan Pemeliharaan Parabot, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	418.870.000	411.274.500	98.19
153	3.02.02.180.009	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	40.000.000	39.910.900	99.78
154	3.02.02.180.010	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	33.760.738.352	30.468.007.646	90.25
155	3.02.02.180.011	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	659.947.672	652.643.286	98.89
156	3.02.02.180.012	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	10.360.729.890	4.559.123.853	44.00
157	3.02.02.180.013	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaran Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	113.000.000	63.797.137	56.46
158	3.02.02.180.014	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	1.288.130.000	1.229.902.959	95.48
159	3.02.02.180.015	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	5.114.949.124	4.674.438.701	91.39
160	3.02.02.180.016.	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	197.291.412	194.666.300	98.67
161	3.02.02.180.017	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	1.683.359.532	1.568.296.307	93.16
162	3.02.02.180.018	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	340.968.456	312.090.800	91.53
163	3.02.02.180.019.	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	769.385.000	681.504.950	88.58

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
164	3.02.02.180.020	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	18.648.250	16.762.000	89.89
165	3.02.02.180.021	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	540.482.897	533.602.154	98.73
166	3.02.02.180.022	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	148.608.000	111.840.868	75.26
167	3.02.02.180.023	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	179.059.360	162.581.200	90.80
168	3.02.02.180.024	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	37.991.000	37.971.750	99.95
169	3.02.02.180.025	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	302.961.000	286.456.339	94.55
170	3.02.02.180.026	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	74.800.000	67.071.900	89.67
171	3.02.02.180.027	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	855.790.032	837.898.500	97.91
172	3.02.02.180.028	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	548.260.950	499.475.356	91.10
173	3.02.02.180.029	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	29.840.000	29.440.000	98.66
174	3.02.02.180.030 .	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	437.900.000	366.408.907	83.67
175	3.02.02.180.031	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	705.835.665	692.416.144	98.10
176	3.02.02.180.032	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	112.300.000	92.633.680	82.49
177	3.02.02.180.033	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	108.236.032	72.759.354	67.22

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
178	3.02.02.180.034	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	505.607.500	364.565.374	72.10
179	3.02.02.180.035.	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	600.919.765	576.203.200	95.89
180	3.02.02.180.036	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	249.999.756	216.943.813	86.78
181	3.02.02.180.037	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan	27.799.030	27.763.040	99.87
182	3.02.02.180.038	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	509.145.365	494.147.734	97.05
183	3.02.02.180.039	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	620.469.252	591.981.000	95.41
184	3.02.02.180.040	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	67.250.000	63.850.000	94.94
185	3.02.02.180.041	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	109.580.000	107.220.500	97.85
186	3.02.02.180.042	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	478.060.200	457.869.075	95.78
187	3.02.02.180.043.	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	433.172.600	405.552.925	93.62
188	3.02.02.180.044	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	818.695.067	685.380.300	83.72
189	3.02.02.180.045	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	47.718.748	44.080.600	92.38
190	3.02.02.180.046	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	381.238.665	340.295.886	89.26

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
191	3.02.02.180.047	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	356.000.000	341.500.000	95.93
192	3.02.02.180.048	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	626.984.600	448.378.450	71.51
193	3.02.02.180.049	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Jasa Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	281.375.300	256.399.159	91.12
194	3.02.02.180.050	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	87.489.800	83.661.627	95.62
195	3.02.02.180.051	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	47.733.000	20.156.374	42.23
196	3.02.02.180.052	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	380.063.805	341.975.750	89.98
197	3.02.02.180.053	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	462.665.750	449.558.391	97.17
198	3.02.02.180.054	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	19.716.883	19.668.200	99.75
199	3.02.02.180.055	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	242.000.000	242.000.000	100.00
200	3.02.02.180.056	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	312.484.250	253.546.550	81.14
201	3.02.02.180.057 .	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	499.615.570	497.305.135	99.54
202	3.02.02.180.058	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	133.000.000	125.713.429	94.52
203	3.02.02.180.059	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	765.559.728	541.925.000	70.79

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
204	3.02.02.180.060	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	70.580.000	69.797.000	98.89
205	3.02.02.180.061	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	863.680.960	861.540.660	99.75
206	3.02.02.180.062	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang	173.600.000	67.422.500	38.84
207	3.02.02.180.063	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	3.384.950.000	2.520.615.200	74.47
208	3.02.02.180.064	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	348.560.000	245.739.250	70.50
209	3.02.02.180.065	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	389.649.000	361.431.800	92.76
210	3.02.02.180.066	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	3.413.565.580	3.138.940.693	91.95
211	3.02.02.180.067	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	248.312.480	240.140.290	96.71
212	3.02.02.180.068	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	30.000.000	29.750.000	99.17
213	3.02.02.180.069	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	34.000.000	20.700.000	60.88
214	3.02.02.180.070	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	396.344.600	395.474.549	99.78
215	3.02.02.180.071	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	37.864.000	37.408.000	98.80
216	3.02.02.180.072	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Dan Keamanan Kantor Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	572.608.903	565.431.377	98.75

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
217	3.02.02.180.073	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	411.739.747	385.370.050	93.60
218	3.02.02.180.074	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	115.000.000	110.729.966	96.29
219	3.02.02.180.075	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Kerja Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	360.019.349	355.734.021	98.81
220	3.02.02.180.076	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	501.800.000	493.584.600	98.36
221	3.02.02.180.077	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	64.200.000	63.950.000	99.61
222	3.02.02.180.078	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	450.883.000	400.637.700	88.86
223	3.02.02.180.079	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	26.512.200	21.103.500	79.60
224	3.02.02.180.080	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	484.178.784	478.690.704	98.87
225	3.02.02.180.081	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	89.778.667	74.150.972	82.59
226	3.02.02.180.082 .	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	576.082.713	563.844.000	97.88
227	3.02.02.180.083	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	201.958.280	192.961.635	95.55
228	3.02.02.180.084	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	268.379.424	264.159.400	98.43
229	3.02.02.180.085	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	24.500.000	24.000.000	97.96

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
230	3.02.02.180.086	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	399.945.600	355.000.077	88.76
231	3.02.02.180.087	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	64.000.000	46.000.000	71.88
232	3.02.02.180.088	Kegiatan Penyediaan Kerohaniaan,Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	40.500.000	27.050.000	66.79
233	3.02.02.180.089	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	33.730.000	32.900.000	97.54
234	3.02.02.180.090	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Sukabumi	38.540.000	28.100.000	72.91
235	3.02.02.180.091	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	-	-	#DIV/0!
236	3.02.02.180.092	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	358.937.624	320.853.461	89.39
237	3.02.02.180.093	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	145.662.604	135.504.400	93.03
238	3.02.02.180.094	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	242.180.000	109.699.741	45.30
239	3.02.02.180.095	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	180.115.000	176.247.018	97.85
240	3.02.02.180.096	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	418.959.150	407.043.659	97.16
241	3.02.02.180.097	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	566.668.280	552.978.147	97.58
242	3.02.02.180.098	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	211.200.000	211.197.000	100.00

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
243	3.02.02.180.099	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	351.863.150	339.884.843	96.60
244	3.02.02.180.100	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	24.200.000	15.500.000	64.05
245	3.02.02.180.101	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	48.992.050	47.316.000	96.58
246	3.02.02.180.102	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	480.035.831	463.063.141	96.46
247	3.02.02.180.103	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	104.293.000	36.794.754	35.28
248	3.02.02.180.104	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	427.411.839	417.053.026	97.58
249	3.02.02.180.105	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	472.991.636	455.984.400	96.40
250	3.02.02.180.106	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	46.400.000	46.357.500	99.91
251	3.02.02.180.107	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	444.002.624	442.531.800	99.67
252	3.02.02.180.108	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	848.069.780	732.211.308	86.34
253	3.02.02.180.109	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	500.000.000	210.000.000	42.00
254	3.02.02.180.110	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	91.318.840	68.519.264	75.03
255	3.02.02.180.111	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	394.060.000	389.493.274	98.84

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
256	3.02.02.180.112	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasiltas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	833.909.000	748.010.996	89.70
257	3.02.02.180.113	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wiayah Kabupaten Karawang	402.367.830	336.525.306	83.64
258	3.02.02.180.114	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	33.693.000	33.223.000	98.61
259	3.02.02.180.115	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	495.000.000	483.238.162	97.62
260	3.02.02.180.116	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	456.243.423	440.376.056	96.52
261	3.02.02.180.117	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	476.000.000	408.925.453	85.91
262	3.02.02.180.118	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	53.683.500	37.588.500	70.02
263	3.02.02.180.119	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	402.362.500	348.332.010	86.57
264	3.02.02.180.120	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	858.113.500	802.169.812	93.48
265	3.02.02.180.121	Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Kerja, Outbond Dan Sepatu Olah Raga Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Cianjur	20.000.000	19.900.000	99.50
266	3.02.02.180.122	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	11.000.000	11.000.000	100.00
267	3.02.02.180.123	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	404.413.500	369.325.400	91.32
268	3.02.02.180.124	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wiayahl Kabupaten Bekasi	27.750.000	21.273.000	76.66

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
269	3.02.02.180.125	Kegiatan Penyediaan Kerohanian Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	16.200.000	12.750.000	78.70
270	3.02.02.180.126	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	520.273.349	504.495.150	96.97
271	3.02.02.180.127	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	112.000.000	111.932.500	99.94
272	3.02.02.180.128	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	61.510.000	61.250.000	99.58
273	3.02.02.180.129	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	52.500.000	52.000.000	99.05
274	3.02.02.180.130	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	576.381.400	549.002.071	95.25
275	3.02.02.180.131	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	14.250.000	12.350.000	86.67
276	3.02.02.180.132	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	32.750.000	22.150.000	67.63
277	3.02.02.180.133	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	226.700.000	225.720.500	99.57
278	3.02.02.180.134	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	113.589.200	98.842.019	87.02
279	3.02.02.180.135	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	808.517.078	784.963.000	97.09
280	3.02.02.180.136	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	17.000.000	17.000.000	100.00
281	3.02.02.180.137	Kegiatan Penyedia Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	68.250.000	66.115.500	96.87

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
282	3.02.02.180.138	Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatan Lainnya Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	578.286.021	507.988.679	87.84
283	3.02.02.180.139	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	119.769.600	62.411.167	52.11
284	3.02.02.180.140	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	350.804.978	332.566.922	94.80
285	3.02.02.180.141	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	650.756.000	618.802.571	95.09
286	3.02.02.180.142	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	249.506.160	245.490.786	98.39
287	3.02.02.180.143	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	37.612.000	37.500.000	99.70
288	3.02.02.180.144	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	108.900.000	104.700.000	96.14
289	3.02.02.180.145	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	472.925.999	470.902.600	99.57
290	3.02.02.180.146	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	151.000.000	46.805.250	31.00
291	3.02.02.180.147	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	299.550.600	293.992.500	98.14
292	3.02.02.180.148	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	737.300.000	492.446.113	66.79
293	3.02.02.180.149.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	326.264.029	294.822.568	90.36
294	3.02.02.180.150	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	294.598.918	269.206.259	91.38

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
295	3.02.02.180.151	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	174.000.000	160.490.000	92.24
296	3.02.02.180.152.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	420.067.300	366.109.373	87.15
297	3.02.02.180.153	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	97.937.500	97.191.600	99.24
298	3.02.02.180.154	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	8.000.000	7.550.000	94.38
299	3.02.02.180.155	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	12.000.000	10.800.000	90.00
300	3.02.02.180.156	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	32.000.000	12.050.000	37.66
301	3.02.02.180.157	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	45.000.000	25.150.000	55.89
302	3.02.02.180.158	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	519.089.810	505.236.579	97.33
303	3.02.02.180.159	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	27.100.000	18.450.000	68.08
304	3.02.02.180.160	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	45.000.000	44.925.000	99.83
305	3.02.02.180.161	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	76.958.800	27.470.890	35.70
306	3.02.02.180.162	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	575.298.448	562.843.000	97.83

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
307	3.02.02.180.163	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	70.530.000	49.300.000	69.90
308	3.02.02.180.164	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	35.926.600	33.766.770	93.99
309	3.02.02.180.165	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	709.942.117	699.028.637	98.46
310	3.02.02.180.166	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	9.000.000	9.000.000	100.00
311	3.02.02.180.167	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	98.502.000	73.794.405	74.92
312	3.02.02.180.168	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	321.590.000	308.830.278	96.03
313	3.02.02.180.169	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung Barat	25.200.000	23.400.000	92.86
314	3.02.02.180.170	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	273.991.015	194.875.000	71.12
315	3.02.02.180.171	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	737.094.625	682.971.775	92.66
316	3.02.02.180.172	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	112.300.000	80.212.000	71.43
317	3.02.02.180.173	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	1.444.108.000	1.409.243.348	97.59
318	3.02.02.180.174	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	33.569.200	33.066.745	98.50

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
319	3.02.02.180.175	Kegiatan Pemeliharaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	560.135.472	538.688.151	96.17
320	3.02.02.180.176	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	151.800.000	144.225.076	95.01
321	3.02.02.180.177	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	1.768.753.512	1.727.026.513	97.64
322	3.02.02.180.178	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	51.400.000	51.400.000	100.00
323	3.02.02.180.179	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	24.080.000	18.439.000	76.57
324	3.02.02.180.180	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannnya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	567.305.190	537.014.687	94.66
325	3.02.02.180.181	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	147.711.000	99.587.974	67.42
326	3.02.02.180.182	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.764.892.011	1.742.716.288	98.74
327	3.02.02.180.183	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	46.499.000	46.499.000	100.00
328	3.02.02.180.184	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	277.724.691	260.952.336	93.96
329	3.02.02.180.185	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	50.600.000	42.500.000	83.99
330	3.02.02.180.186	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	22.800.000	22.750.000	99.78
331	3.02.02.180.187	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan	301.412.480	274.402.174	91.04

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
		Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber			
332	3.02.02.180.188	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	578.296.991	561.809.343	97.15
333	3.02.02.180.189	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	16.500.000	15.180.000	92.00
334	3.02.02.180.190	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	120.580.000	118.605.905	98.36
335	3.02.02.180.191	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	36.900.000	24.300.000	65.85
336	3.02.02.180.192	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	396.640.000	376.120.000	94.83
337	3.02.02.180.193	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	30.000.000	27.750.000	92.50
338	3.02.02.180.194	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	446.313.350	410.809.046	92.04
339	3.02.02.180.195	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	269.200.000	266.834.954	99.12
340	3.02.02.180.196	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	19.993.140	19.153.100	95.80
341	3.02.02.180.197	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	723.300.000	711.939.263	98.43
342	3.02.02.180.198	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	184.062.897	170.071.748	92.40
343	3.02.02.180.199	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan	153.824.755	147.052.300	95.60

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
		Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug			
344	3.02.02.180.200	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	14.000.000	14.000.000	100.00
345	3.02.02.180.201	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	299.460.000	261.631.975	87.37
346	3.02.02.180.202	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	29.000.000	28.000.000	96.55
347	3.02.02.180.203	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	144.000.000	47.500.000	32.99
348	3.02.02.180.204	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	95.650.000	46.104.959	48.20
349	3.02.02.180.205	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	231.500.000	172.153.000	74.36
350	3.02.02.180.206	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	99.422.740	71.033.600	71.45
351	3.02.02.180.207	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	60.000.000	55.800.000	93.00
352	3.02.02.180.208.	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	16.800.000	10.800.000	64.29
353	3.02.02.180.209.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	420.199.775	390.672.343	92.97
354	3.02.02.180.210	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kaupaten Indramayu I	557.833.550	543.087.840	97.36
355	3.02.02.180.211	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	23.930.000	23.930.000	100.00

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
356	3.02.02.180.212	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	419.863.600	376.153.250	89.59
357	3.02.02.180.213	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	964.125.480	935.767.143	97.06
358	3.02.02.180.214	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	476.550.262	393.159.000	82.50
359	3.02.02.180.215	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	76.700.000	42.406.051	55.29
360	3.02.02.180.216	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	361.932.480	309.560.700	85.53
361	3.02.02.180.217	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	73.300.000	56.650.000	77.29
362	3.02.02.180.218	Kegiatan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	428.239.950	378.151.250	88.30
363	3.02.02.180.219	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	442.260.000	329.469.652	74.50
364	3.02.02.180.220	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	279.591.334	256.359.212	91.69
365	3.02.02.180.221	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	18.000.000	14.700.000	81.67
366	3.02.02.180.222	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kota Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	437.000.000	313.440.510	71.73
367	3.02.02.180.223	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	438.300.359	346.144.398	78.97
368	3.02.02.180.224	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	82.000.000	79.780.000	97.29

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
369	3.02.02.180.225	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	340.620.000	339.931.064	99.80
370	3.02.02.180.226	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	45.360.000	40.641.032	89.60
371	3.02.02.180.227	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	740.526.458	727.171.992	98.20
372	3.02.02.180.228	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	316.476.475	257.622.179	81.40
373	3.02.02.180.229	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	69.991.435	56.031.000	80.05
374	3.02.02.180.230	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	12.000.000	12.000.000	100.00
375	3.02.02.180.231	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	414.475.968	399.894.664	96.48
376	3.02.02.180.232	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	367.836.600	305.333.471	83.01
377	3.02.02.180.233	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	107.912.000	55.761.500	51.67
378	3.02.02.180.234	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	365.448.000	357.900.000	97.93
379	3.02.02.180.235	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	411.140.275	397.560.238	96.70
380	3.02.02.180.236	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	565.906.457	499.767.454	88.31
381	3.02.02.180.237	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	18.320.000	18.220.000	99.45

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
382	3.02.02.180.238	Kegiatan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	509.000.000	501.211.849	98.47
383	3.02.02.180.239	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	194.439.500	181.692.201	93.44
384	3.02.02.180.240	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	506.200.000	497.259.500	98.23
385	3.02.02.180.241	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	549.548.271	528.882.369	96.24
386	3.02.02.180.242	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	603.300.270	581.770.582	96.43
387	3.02.02.180.243	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	423.150.000	383.499.500	90.63
388	3.02.02.180.244	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	155.596.400	138.061.000	88.73
389	3.02.02.180.245	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	215.714.584	202.142.000	93.71
390	3.02.02.180.246	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	404.283.668	364.686.226	90.21
391	3.02.02.180.247	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	396.800.000	392.602.235	98.94
392	3.02.02.180.248	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	363.820.631	355.714.666	97.77
393	3.02.02.180.249	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	187.907.750	184.592.000	98.24
394	3.02.02.180.250	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	200.145.050	192.270.701	96.07

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
395	3.02.02.180.251	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	17.386.875	17.263.500	99.29
396	3.02.02.180.252	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	312.040.000	302.894.384	97.07
397	3.02.02.180.253	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	494.893.304	489.208.870	98.85
398	3.02.02.180.254	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	260.794.000	235.398.990	90.26
399	3.02.02.180.255	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	151.574.136	131.836.100	86.98
400	3.02.02.180.256	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	17.000.000	17.000.000	100.00
401	3.02.02.180.257	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	711.951.000	702.076.500	98.61
402	3.02.02.180.258	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	165.545.000	164.765.400	99.53
403	3.02.02.180.259	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	369.270.000	365.128.830	98.88
404	3.02.02.180.260	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	213.302.185	206.146.215	96.65
405	3.02.02.180.261	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	68.778.860	68.435.000	99.50
406	3.02.02.180.262	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	34.250.000	34.225.000	99.93
407	3.02.02.180.263	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	292.999.950	290.049.950	98.99

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
408	3.02.02.180.264	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	463.140.700	436.412.571	94.23
409	3.02.02.180.265	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	186.000.000	112.197.920	60.32
410	3.02.02.180.266	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	659.650.000	627.119.520	95.07
411	3.02.02.180.267	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	29.800.000	27.710.400	92.99
412	3.02.02.180.268	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	433.677.300	324.376.800	74.80
413	3.02.02.180.269	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	566.941.677	511.385.403	90.20
414	3.02.02.180.270	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	528.696.580	519.599.470	98.28
415	3.02.02.180.271	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	122.141.000	85.189.500	69.75
416	3.02.02.180.272	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	101.000.000	99.470.935	98.49
417	3.02.02.180.273	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	315.982.250	280.881.500	88.89
418	3.02.02.180.274	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	271.404.308	214.385.302	78.99
419	3.02.02.180.275	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	1.073.533.402	1.045.340.000	97.37
420	3.02.02.180.276 .5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	390.071.000	345.627.482	88.61

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
421	3.02.02.180.277	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	27.500.000	24.200.000	88.00
422	3.02.02.180.278	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	265.628.900	227.773.750	85.75
423	3.02.02.180.279	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	345.472.000	297.044.650	85.98
424	3.02.02.180.280	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	124.565.000	124.092.527	99.62
425	3.02.02.180.281	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	26.400.000	20.250.000	76.70
426	3.02.02.180.282	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	355.663.690	265.922.100	74.77
427	3.02.02.180.283	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	423.366.557	332.745.884	78.60
428	3.02.02.180.284	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	173.200.000	161.559.410	93.28
429	3.02.02.180.285	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	21.000.000	17.000.000	80.95
430	3.02.02.180.286	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	437.793.000	308.078.037	70.37
431	3.02.02.180.287	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	406.979.255	392.098.000	96.34
432	3.02.02.180.288	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	239.500.704	238.421.609	99.55
433	3.02.02.180.289	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	303.489.925	303.000.000	99.84

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
434	3.02.02.180.290	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	477.415.500	429.993.750	90.07
435	3.02.02.180.291	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	267.295.211	261.735.734	97.92
436	3.02.02.180.292	Kegiatan Penyediaan Langanan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	279.921.991	250.937.692	89.65
437	3.02.02.180.293	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	104.937.500	104.425.500	99.51
438	3.02.02.180.294	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	278.574.250	273.188.250	98.07
439	3.02.02.180.295	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	579.674.069	439.635.387	75.84
440	3.02.02.180.296	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	192.000.000	152.652.718	79.51
441	3.02.02.180.297	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Pangandaran	56.880.000	49.975.000	87.86
442	3.02.02.180.298	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	348.645.822	324.575.300	93.10
443	3.02.02.180.299	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Tekhnis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	241.400.000	214.708.705	88.94
444	3.02.02.180.300	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	20.999.000	14.554.500	69.31
445	3.02.02.180.301	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	226.547.050	189.276.550	83.55
446	3.02.02.180.302	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	246.677.230	241.016.720	97.71
447	3.02.02.180.303	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	257.636.474	230.583.211	89.50

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
448	3.02.02.180.304	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	76.980.000	70.196.880	91.19
449	3.02.02.180.305.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	369.274.000	360.559.492	97.64
450	3.02.02.180.306	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	80.844.680	76.268.614	94.34
451	3.02.02.180.307	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	264.460.000	189.464.499	71.64
452	3.02.02.180.308	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	782.920.000	676.296.940	86.38
453	3.02.02.180.309	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	942.491.254	760.687.100	80.71
454	3.02.02.180.310	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	477.238.035	468.340.326	98.14
455	3.02.02.180.311	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	73.221.000	69.375.500	94.75
456	3.02.02.180.312	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	73.650.000	72.300.000	98.17
457	3.02.02.180.313.	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	184.400.000	183.113.070	99.30
458	3.02.02.180.314	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Jasa Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	458.370.000	410.462.388	89.55
459	3.02.02.180.315.	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	134.625.600	110.489.562	82.07
460	3.02.02.180.316.	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	597.481.000	544.959.120	91.21
461	3.02.02.180.317	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	6.936.438.027	6.140.497.285	88.53

NO.	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	RELIASASI	%
462	3.02.02.180.318	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	60.793.000	59.435.722	97.77
463	3.02.02.180.319	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	1.623.892.624	1.622.244.767	99.90
464	3.02.02.180.320	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	102.385.800	84.024.655	82.07
465	3.02.02.180.321	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	2.435.308.617	2.377.647.568	97.63
466	3.02.02.180.322	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	582.990.850	540.120.792	92.65
467	3.02.02.180.323	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	63.900.000	45.067.500	70.53
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**341.204.880.696**	**306.669.623.111**	**89.88**
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**434.680.753.292**	**422.107.692.331**	**97.11**
		TOTAL BELANJA	**775.885.633.988**	**728.777.315.442**	**93.93**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provini Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023, RKT Tahun 2019, RKPD Tahun 2019 dan PK Tahun 2019.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Implementasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2019 mencakup 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2019 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

3.2 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019;

Evaluasi dan Analisis Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023, dalam pelaksanaannya memiliki 2 (dua) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Nilai Capaian Kinera 2019	Predikat
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	57.52	59,26	103,025	AA	Sangat Memuaskan

Tabel 3.1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Nilai Capaian Kinera 2019	Predikat
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	%	82,80	84,60	102,19	AA	Sangat Memuaskan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di seluruh Pusat Pelayanan Pendapatan Daeran se-Jawa Barat dilakanakan setiap semester atau 1 (satu) tahun 2 (dua) kali dengan hasil sebagai berikut :

Semester I Tahun 2019 : 84,62 point Predikat “B”

Semester II Tahun 2019 : 84,58 point Predikat “B”

Rata-Rata Tahun 2019 : 84,60 point Predikat “B”

Dokumen Surveys Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimil : (022) 7564880
Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

Bandung, 31 Juli 2019

Nomor : 977/1919 -PI
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2019

Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Barat
cq. Kepala Biro Organisasi
di
TEMPAT

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Pada Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan setiap akhir Semester dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2019 di 24 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Laporan SKM dimaksud menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) BAPENDA Provinsi Jawa Barat sebesar 84,62 dengan mutu pelayanan B (BAIK). Nilai SKM mengalami peningkatan sebesar 0,58 point dari Semester II Tahun 2018 (sebesar 84,04).

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Jawa Barat (sebagai bahan laporan).

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PER UNSUR LAYANAN SEMESTER I
PADA KANTOR PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) SE JAWA BARAT TAHUN 2019

NO	KANTOR PPPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM / UNIT	MUTU PELAYANAN	KETERANGAN
		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	KOTA DEPOK I	0.387	0.379	0.387	0.396	0.386	0.396	0.394	0.390	0.410	3.525	88.13	B	BAIK
2.	KOTA DEPOK II CINERE	0.357	0.360	0.375	0.353	0.369	0.369	0.385	0.393	0.376	3.337	83.43	B	BAIK
3.	KABUPATEN BOGOR	0.354	0.349	0.349	0.375	0.360	0.378	0.374	0.369	0.407	3.315	82.88	B	BAIK
4.	KOTA BOGOR	0.368	0.369	0.360	0.356	0.370	0.368	0.366	0.352	0.406	3.315	82.88	B	BAIK
5.	KOTA SUKABUMI	0.388	0.381	0.379	0.382	0.371	0.398	0.378	0.360	0.373	3.410	85.25	B	BAIK
6.	KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	0.391	0.359	0.380	0.354	0.358	0.368	0.369	0.366	0.365	3.310	82.75	B	BAIK
7.	KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU	0.384	0.384	0.372	0.392	0.363	0.370	0.365	0.365	0.361	3.356	83.91	B	BAIK
8.	KABUPATEN CIANJUR	0.398	0.398	0.397	0.399	0.397	0.398	0.402	0.393	0.416	3.598	89.95	A	SANGAT BAIK
9.	KOTA BEKASI	0.373	0.370	0.360	0.376	0.370	0.370	0.367	0.352	0.385	3.323	83.08	B	BAIK
10.	KABUPATEN BEKASI	0.366	0.352	0.367	0.412	0.373	0.371	0.368	0.361	0.423	3.393	84.83	B	BAIK
11.	KABUPATEN KARAWANG	0.375	0.384	0.376	0.384	0.382	0.377	0.377	0.365	0.380	3.400	85.00	B	BAIK
12.	KABUPATEN PURWAKARTA	0.351	0.368	0.375	0.408	0.353	0.358	0.368	0.357	0.422	3.360	84.00	B	BAIK
13.	KABUPATEN SUBANG	0.370	0.375	0.364	0.370	0.370	0.373	0.380	0.369	0.359	3.330	83.25	B	BAIK
14.	KOTA CIREBON	0.371	0.377	0.347	0.387	0.361	0.370	0.377	0.346	0.389	3.325	83.13	B	BAIK
15.	KABUPATEN CIREBON I SUMBER	0.379	0.370	0.360	0.394	0.376	0.377	0.372	0.383	0.407	3.418	85.45	B	BAIK
16.	KABUPATEN CIREBON II CILEDUG	0.349	0.349	0.381	0.365	0.349	0.365	0.365	0.381	0.428	3.332	83.30	B	BAIK
17.	KABUPATEN INDRAMAYU I	0.363	0.374	0.352	0.376	0.368	0.376	0.369	0.362	0.401	3.341	83.53	B	BAIK
18.	KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS	0.369	0.360	0.390	0.366	0.369	0.382	0.375	0.392	0.420	3.423	85.58	B	BAIK
19.	KABUPATEN KUNINGAN	0.368	0.369	0.369	0.368	0.368	0.368	0.368	0.369	0.368	3.315	82.88	B	BAIK
20.	KABUPATEN MAJALENGKA	0.368	0.362	0.349	0.379	0.366	0.369	0.361	0.358	0.401	3.313	82.83	B	BAIK
21.	KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	0.357	0.361	0.361	0.379	0.370	0.362	0.360	0.356	0.426	3.332	83.30	B	BAIK
22.	KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	0.368	0.368	0.347	0.382	0.365	0.374	0.366	0.350	0.398	3.318	82.95	B	BAIK
23.	KOTA BANDUNG III SOEKARNO-HATTA	0.376	0.371	0.354	0.381	0.366	0.365	0.367	0.357	0.393	3.330	83.25	B	BAIK
24.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	0.402	0.380	0.350	0.393	0.351	0.352	0.352	0.391	0.356	3.327	83.18	B	BAIK
25.	KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK	0.357	0.366	0.375	0.370	0.367	0.393	0.366	0.357	0.390	3.341	83.53	B	BAIK
26.	KABUPATEN BANDUNG II SOREANG	0.383	0.383	0.376	0.394	0.379	0.378	0.384	0.369	0.388	3.434	85.85	B	BAIK
27.	KABUPATEN SUMEDANG	0.384	0.386	0.384	0.379	0.387	0.389	0.393	0.376	0.393	3.471	86.78	B	BAIK
28.	KABUPATEN GARUT	0.373	0.367	0.365	0.367	0.363	0.372	0.363	0.364	0.383	3.317	82.93	B	BAIK
29.	KOTA TASIKMALAYA	0.407	0.388	0.394	0.395	0.378	0.412	0.398	0.390	0.374	3.536	88.40	A	SANGAT BAIK
30.	KABUPATEN TASIKMALAYA	0.379	0.379	0.366	0.388	0.374	0.364	0.365	0.383	0.376	3.374	84.35	B	BAIK
31.	KABUPATEN CIAMIS	0.387	0.390	0.388	0.392	0.385	0.392	0.398	0.393	0.401	3.526	88.15	B	BAIK
32.	KABUPATEN PANGANDARAN	0.390	0.411	0.410	0.415	0.418	0.411	0.415	0.409	0.408	3.687	92.18	A	SANGAT BAIK
33.	KOTA CIMAHI	0.362	0.363	0.337	0.378	0.359	0.365	0.365	0.346	0.408	3.283	82.08	B	BAIK
34	KOTA BANJAR	0.342	0.363	0.372	0.347	0.384	0.395	0.395	0.380	0.384	3.362	84.05	B	BAIK
	JUMLAH IKM PER OPPD	12.686	12.665	12.568	12.952	12.625	12.825	12.767	12.604	13.575	115.077	2876.935		
	IKM UNIT PELAYANAN BAPENDA JABAR											84.62	B	BAIK

Bandung, Juli 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

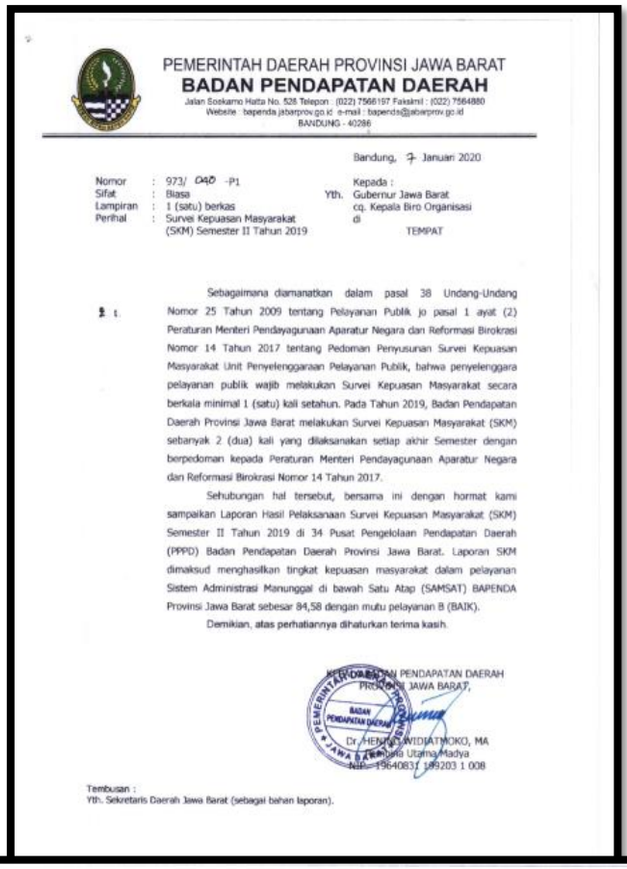

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimil : (022) 7564880
Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

Bandung, 7 Januari 2020

Nomor : 973/ 040 -P1
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2019

Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Barat
cq. Kepala Biro Organisasi
di
TEMPAT

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Pada Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan setiap akhir Semester dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2019 di 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Laporan SKM dimaksud menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) BAPENDA Provinsi Jawa Barat sebesar 84,58 dengan mutu pelayanan B (BAIK).

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Jawa Barat (sebagai bahan laporan).

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PER UNSUR LAYANAN SEMESTER II
PADA KANTOR PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) SE JAWA BARAT TAHUN 2019

NO	KANTOR PPPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM / UNIT	MUTU PELAYANAN	KETERANGAN
		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	KOTA DEPOK I	0.399	0.367	0.402	0.423	0.377	0.395	0.392	0.365	0.407	3.527	88.18	B	BAIK
2.	KOTA DEPOK II CINERE	0.380	0.384	0.374	0.342	0.379	0.390	0.400	0.394	0.359	3.402	85.05	B	BAIK
3.	KABUPATEN BOGOR	0.358	0.356	0.359	0.390	0.374	0.362	0.355	0.372	0.390	3.316	82.90	B	BAIK
4.	KOTA BOGOR	0.378	0.365	0.359	0.376	0.372	0.369	0.369	0.355	0.372	3.315	82.88	B	BAIK
5.	KOTA SUKABUMI	0.389	0.386	0.386	0.384	0.372	0.404	0.380	0.361	0.380	3.442	86.05	B	BAIK
6.	KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	0.391	0.359	0.381	0.354	0.359	0.370	0.369	0.366	0.365	3.314	82.85	B	BAIK
7.	KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU	0.384	0.384	0.373	0.396	0.365	0.371	0.369	0.372	0.353	3.367	84.18	B	BAIK
8.	KABUPATEN CIANJUR	0.398	0.398	0.397	0.399	0.397	0.398	0.402	0.393	0.416	3.598	89.95	A	SANGAT BAIK
9.	KOTA BEKASI	0.375	0.373	0.362	0.378	0.372	0.372	0.368	0.358	0.386	3.344	83.60	B	BAIK
10.	KABUPATEN BEKASI	0.366	0.368	0.368	0.412	0.373	0.372	0.368	0.360	0.408	3.395	84.88	B	BAIK
11.	KABUPATEN KARAWANG	0.375	0.385	0.377	0.384	0.382	0.377	0.377	0.365	0.380	3.402	85.05	B	BAIK
12.	KABUPATEN PURWAKARTA	0.362	0.370	0.376	0.408	0.365	0.363	0.371	0.366	0.422	3.403	85.08	B	BAIK
13.	KABUPATEN SUBANG	0.370	0.375	0.364	0.370	0.370	0.374	0.380	0.369	0.359	3.331	83.28	B	BAIK
14.	KOTA CIREBON	0.373	0.378	0.354	0.389	0.364	0.371	0.376	0.349	0.390	3.344	83.60	B	BAIK
15.	KABUPATEN CIREBON I SUMBER	0.368	0.369	0.367	0.400	0.372	0.374	0.376	0.375	0.420	3.421	85.53	B	BAIK
16.	KABUPATEN CIREBON II CILEDUG	0.349	0.365	0.381	0.365	0.349	0.365	0.365	0.381	0.428	3.348	83.70	B	BAIK
17.	KABUPATEN INDRAMAYU I	0.368	0.369	0.357	0.385	0.360	0.369	0.367	0.363	0.409	3.347	83.68	B	BAIK
18.	KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS	0.382	0.395	0.380	0.386	0.365	0.415	0.406	0.358	0.354	3.441	86.03	B	BAIK
19.	KABUPATEN KUNINGAN	0.368	0.369	0.368	0.369	0.368	0.368	0.368	0.369	0.368	3.315	82.88	B	BAIK
20.	KABUPATEN MAJALENGKA	0.366	0.357	0.334	0.377	0.368	0.372	0.379	0.367	0.393	3.313	82.83	B	BAIK
21.	KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	0.360	0.359	0.362	0.377	0.367	0.367	0.365	0.357	0.419	3.333	83.33	B	BAIK
22.	KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	0.361	0.369	0.367	0.382	0.360	0.375	0.375	0.343	0.386	3.318	82.95	B	BAIK
23.	KOTA BANDUNG III SOEKARNO-HATTA	0.371	0.368	0.363	0.374	0.353	0.376	0.378	0.355	0.407	3.345	83.63	B	BAIK
24.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	0.402	0.380	0.347	0.393	0.351	0.352	0.352	0.391	0.356	3.324	83.10	B	BAIK
25.	KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK	0.368	0.368	0.357	0.390	0.370	0.372	0.370	0.354	0.395	3.344	83.60	B	BAIK
26.	KABUPATEN BANDUNG II SOREANG	0.382	0.384	0.376	0.394	0.380	0.378	0.384	0.371	0.389	3.438	85.95	B	BAIK
27.	KABUPATEN SUMEDANG	0.379	0.381	0.381	0.376	0.374	0.379	0.379	0.378	0.377	3.404	85.10	B	BAIK
28.	KABUPATEN GARUT	0.373	0.367	0.365	0.367	0.363	0.372	0.363	0.364	0.383	3.317	82.93	B	BAIK
29.	KOTA TASIKMALAYA	0.369	0.364	0.342	0.387	0.382	0.388	0.377	0.366	0.387	3.362	84.05	B	BAIK
30.	KABUPATEN TASIKMALAYA	0.383	0.381	0.370	0.393	0.374	0.364	0.364	0.383	0.380	3.392	84.80	B	BAIK
31.	KABUPATEN CIAMIS	0.387	0.390	0.388	0.393	0.386	0.391	0.398	0.393	0.401	3.527	88.18	B	BAIK
32.	KABUPATEN PANGANDARAN	0.389	0.398	0.396	0.399	0.406	0.401	0.411	0.397	0.395	3.592	89.80	A	SANGAT BAIK
33.	KOTA CIMAHI	0.357	0.355	0.344	0.367	0.357	0.368	0.378	0.356	0.402	3.284	82.10	B	BAIK
34.	KOTA BANJAR	0.342	0.363	0.372	0.347	0.384	0.395	0.395	0.381	0.384	3.363	84.08	B	BAIK
	JUMLAH IKM PER CPPD	12.722	12.699	12.549	13.026	12.610	12.829	12.826	12.547	13.220	115.028	2875.700		
	IKM UNIT PELAYANAN BAPENDA JABAR											84.58	B	BAIK

Desember 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

URAIAN PENDAPATAN		TARGET PERUBAHAN TAHUN 2019	REALISASI (UNAUDIT)	%	KET.
PENDAPATAN DAERAH		36.127.118.512.463	36.315.884.074.395	100.52%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		20.933.819.874.978	21.522.255.909.952	102.81%	Target Bapenda
PAJAK DAERAH		19.223.000.942.000	19.626.304.134.265	102.10%	
1.	PKB	8.034.519.000.000	8.174.357.408.900	101.74%	
2.	BBNKB	6.026.074.000.000	6.300.781.441.900	104.56%	
3.	PBBKB	2.563.169.934.000	2.616.034.041.920	102.06%	
4.	PAJAK AIR	60.000.000.000	55.663.013.236	92.77%	
5.	PAJAK ROKOK	2.539.238.008.000	2.479.468.228.309	97.65%	
RETRIBUSI DAERAH		53.183.796.175	56.239.530.756	105.75%	
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		387.109.923.387	386.442.976.038	99.83%	
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		1.270.525.213.416	1.453.269.268.893	114.38%	
DANA PERIMBANGAN		15.115.298.993.485	14.715.372.046.649	97.35%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	1.553.530.410.384	1.483.785.231.865	95.51%	
2.	Dana Alokasi Umum	3.212.647.404.000	3.212.647.404.000	100.00%	
3.	Dana Alokasi Khusus	10.349.121.179.101	10.018.939.410.784	96.81%	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		77.999.644.000	78.256.117.794	100.33%	

Tabel 3.3.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

Sumber : Kaspro (data diolah)

Kemandirian keuangan dapat diukur dari persentasi PAD terhdap pendapatan daerah, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, realiasinya adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah 201}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.522.255.909.952,00}{36.127.118.512.463,00} \times 100\%$$

$$= 59,26\%$$

$$\text{Realisasi 2018} = \frac{\text{Realisasi 2018}}{\text{Target 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{59{,}26\%}{57{,}52\%} \times 100\%$$

$$= 103{,}02\%$$

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2019
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	57.52	59,26	103,025	100,68	AA

Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 digambarkan dalam table berikut :

URAIAN PENDAPATAN		TARGET PERUBAHAN TAHUN 2019	REALISASI (UNAUDIT)	%	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2018 AUDITED	REALISASI (AUDITED 2018)	%
PENDAPATAN DAERAH		36.127.118.512.463	36.315.884.074.395	100.52%	33.264.593.878.621	33.919.022.032.347	101.97%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		20.933.819.874.978	21.522.255.909.952	102.81%	**18.817.250.109.020**	**19.642.915.448.763**	104.39%
PAJAK DAERAH		19.223.000.942.000	19.626.304.134.265	102.10%	**17.381.809.897.000**	**18.153.616.036.193**	104.44%
1.	PKB	8.034.519.000.000	8.174.357.408.900	101.74%	7.180.342.000.000	7.540.768.220.845	105.02%
2.	BBNKB	6.026.074.000.000	6.300.781.441.900	104.56%	5.352.889.000.000	5.527.989.187.700	103.27%
3.	PBBKB	2.563.169.934.000	2.616.034.041.920	102.06%	2.356.184.651.000	2.512.911.700.663	106.65%
4.	PAJAK AIR	60.000.000.000	55.663.013.236	92.77%	42.624.011.000	52.861.602.273	124.02%
5.	PAJAK ROKOK	2.539.238.008.000	2.479.468.228.309	97.65%	2.449.770.235.000	2.519.085.324.712	102.83%
RETRIBUSI DAERAH		53.183.796.175	56.239.530.756	105.75%	45.267.605.170	49.176.487.699	108.64%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG		387.109.923.387	386.442.976.038	99.83%	349.779.545.863	348.537.989.633	99.65%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		1.270.525.213.416	1.453.269.268.893	114.38%	1.040.393.060.987	1.091.584.935.238	104.92%
DANA PERIMBANGAN		15.115.298.993.485	14.715.372.046.649	97.35%	**14.379.237.589.601**	**14.208.000.403.584**	98.81%
1	Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	1.553.530.410.384	1.483.785.231.865	95.51%	1.609.724.433.601	1.804.540.601.861	112.10%
2.	Dana Alokasi Umum	3.212.647.404.000	3.212.647.404.000	100.00%	3.023.552.986.000	3.023.552.986.000	100.00%
3.	Dana Alokasi Khusus	10.349.121.179.101	10.018.939.410.784	96.81%	9.745.960.170.000	9.379.906.815.723	96.24%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		77.999.644.000	78.256.117.794	100.33%	68.106.180.000	68.106.180.000	100.00%

Page 1

$$\text{Rumus} : = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2018}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{19.642.915.448.763}}{\mathbf{33.919.022.032.347}} \times 100\%$$

$$= 57{,}91\%$$

Realisasi Kemandirian keuangan Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar 57,91%, indikator ini merupakan indikator restra baru sehingga tidak ada ada target untuk tahun 2018, namun demikian jika targetnya disamakan dengan target 2019 yaitu sebesar 57,52%, maka capaian kinerja tahun 2018 adalah :

$$\text{Realisasi 2019} = \frac{\text{Realisasi 2019}}{\text{Target 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{57{,}91\%}{57{,}52\%} \times 100\%$$

$$= 100{,}68\%$$

3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SD TAHUN 2019	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TERHADAP RPJMD 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	59,26	61,59	96,22%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	84,60	84,80	99,76%

3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Rata-rata rasio PAD daerah provinsi menunjukkantingkat kemandirian yang makin baik

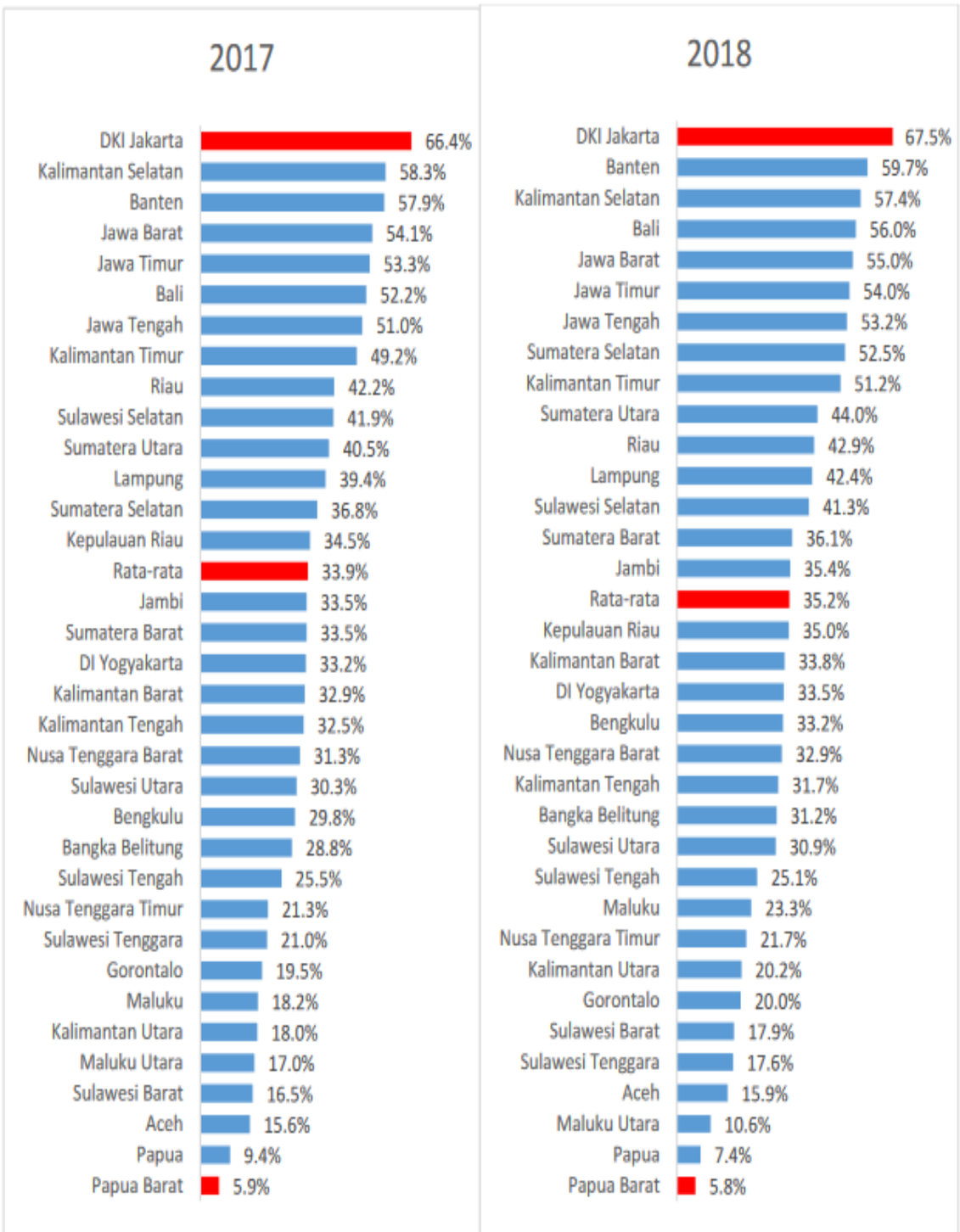

Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf

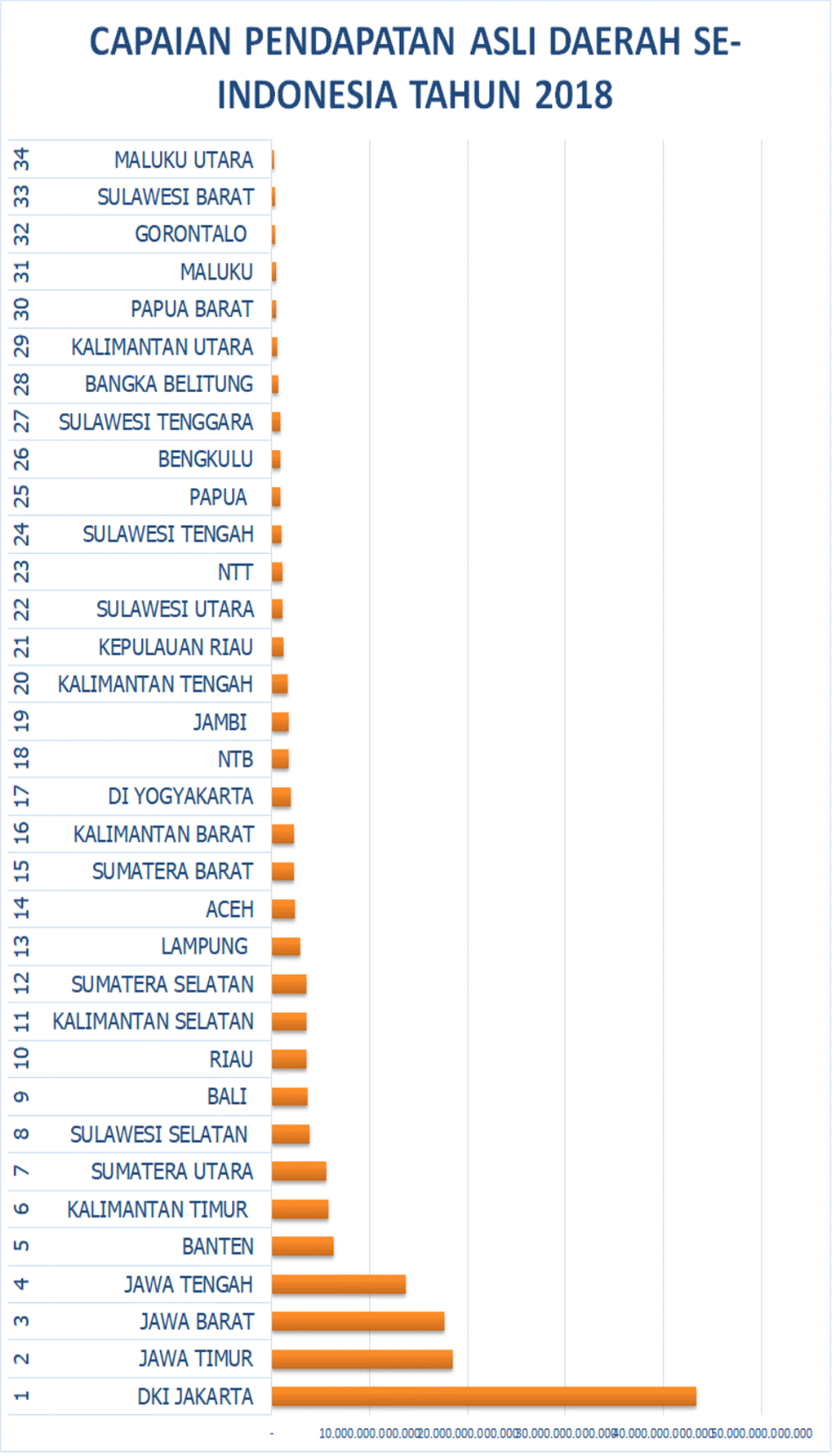
CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SE-INDONESIA TAHUN 2018
34 MALUKU UTARA
33 SULAWESI BARAT
32 GORONTALO
31 MALUKU
30 PAPUA BARAT
29 KALIMANTAN UTARA
28 BANGKA BELITUNG
27 SULAWESI TENGGARA
26 BENGKULU
25 PAPUA
24 SULAWESI TENGAH
23 NTT
22 SULAWESI UTARA
21 KEPULAUAN RIAU
20 KALIMANTAN TENGAH
19 JAMBI
18 NTB
17 DI YOGYAKARTA
16 KALIMANTAN BARAT
15 SUMATERA BARAT
14 ACEH
13 LAMPUNG
12 SUMATERA SELATAN
11 KALIMANTAN SELATAN
10 RIAU
9 BALI
8 SULAWESI SELATAN
7 SUMATERA UTARA
6 KALIMANTAN TIMUR
5 BANTEN
4 JAWA TENGAH
3 JAWA BARAT
2 JAWA TIMUR
1 DKI JAKARTA
- 10.000.000.000.000 20.000.000.000.000 30.000.000.000.000 40.000.000.000.000 50.000.000.000.000

3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

3.6.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam melakukan penilaian kinerja pendapatan tahun 2019, tidak akan terlepas dari penilaian asumsi-asumsi yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah, terutama yang telah disepakati bersama DPRD sejak APBD murni hingga koreksinya pada perubahan APBD 2019 lalu.

Kondisi lingkungan yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah di murni maupun perubahan 2019, antara lain kondisi ekonomi makro nasional, kebijakan dana transfer dalam APBN Perubahan 2019, alokasi kuota BBM serta kebijakan harga BBM yang mengikuti harga minyak mentah dunia, kondisi pemasaran kendaraan, preferensi konsumsi masyarakat yang dipengaruhi tingkat daya beli masyarakat daerah hingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Intensifikasi yang dilakukan seluruh perangkat daerah untuk pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, tidak diikuti oleh penerimaan dana transfer yang secara nasional hanya merealisasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 91,06% dari pagu APBN tahun 2019, yang dipengaruhi oleh ketidaktercapaian penerimaan pajak, kepabeaan dan cukai serta penerimaan Negara bukan pajak, sehingga target pendapatan daerah tahun 2019 dapat teralisasikan sebesar Rp.**36,315 triliun** atau **100,52%** dibandingkan dengan penetapan target perubahan sebesar Rp.**36,127 triliun**.

Berdasarkan jenis penerimaannya, pencapaian target PAD mencapai Rp.**21,522 triliun** atau sebesar **102,81%**, Dana Perimbangan hanya mencapai Rp**.14,715 triliun** atau sebesar **97,35%** serta Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah yang mencapai Rp.**78,256 miliar** atau sebesar **100,33%** dibandingkan terhadap masing-masing target perubahan APBD 2019.

Pencapaian pendapatan daerah tahun 2019, secara lebih teknis dapat disampaikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pencapaian PAD sebesar Rp.**21,522 triliun** atau sebesar **102,81%** dari target perubahan tahun 2019 sebesar Rp.20,933 triliun, terkontribusi dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp.19,626 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp.56,239 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.386,442 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.1,453 triliun.

1. PAJAK DAERAH

a. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 101,74% atau sebesar Rp.8,174 triliun dari target sebesar Rp.8,034 triliun, Ketercapaian tersebut, sesuai dengan estimasi perhitungan dari potensi KBM, kontribusi dari pembelian kendaraan baru, dan estimasi wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB pada saat penetapan target PKB.

Selain akurasi dalam penetapan target, ketercapaian tersebut ditopang oleh upaya fiskus yang secara terus menerus meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan dengan berbagai macam pengembangan pelayanan, penelusuran kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB serta operasi gabungan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, serta dampak positif kebijakan double untung yaitu kebijakan pembebasan denda PKB dan pengurangan satu tahun pokok pajak bagi penunggak lebih dari lima tahun, yang dimulai pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan 30 Desember 2019.

Capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	P3DW	PKB		
		TARGET	REALISASI	%
1	KAB. SUKABUMI II P.RATU	50.684.000.000	53.943.230.600	106,43%
2	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	258.049.000.000	271.256.144.000	105,12%
3	KOTA CIREBON	110.514.000.000	115.932.154.400	104,90%
4	KOTA SUKABUMI	61.184.000.000	64.168.687.600	104,88%
5	KOTA BANJAR	19.865.000.000	20.780.299.000	104,61%
6	KAB. CIAMIS I	80.971.000.000	84.612.262.800	104,50%
7	KAB. BOGOR (CIBINONG)	662.029.000.000	690.470.279.500	104,30%
8	KAB. CIAMIS II PGDRN	26.509.000.000	27.533.004.300	103,86%
9	KOTA BEKASI	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
10	KAB. INDRAMAYU I	122.027.000.000	126.549.483.800	103,71%
11	KAB. SUBANG	137.652.000.000	142.720.017.900	103,68%
12	KOTA BOGOR	298.180.000.000	306.841.210.100	102,90%
13	KAB. SUKABUMI I CBDK	125.994.000.000	129.301.874.100	102,63%
14	KAB. CIANJUR	158.309.000.000	162.411.915.200	102,59%
15	KOTA DEPOK II CINERE	227.869.000.000	233.703.106.200	102,56%
16	KOTA TASIKMALAYA	96.010.000.000	98.366.069.000	102,45%
17	KAB. BANDUNG II SOREANG	233.811.000.000	238.860.117.450	102,16%
18	KAB. GARUT	133.053.000.000	135.829.932.900	102,09%
19	KAB. KUNINGAN	104.169.000.000	106.327.069.200	102,07%
20	KAB. SUMEDANG	93.558.000.000	95.433.847.600	102,01%
21	KOTA DEPOK I	440.557.000.000	449.195.984.300	101,96%

NO	P3DW	PKB		
		TARGET	REALISASI	%
22	KAB. CIREBON II CLDG	68.775.000.000	70.112.842.550	101,95%
23	KAB. CIREBON I SBR	171.071.000.000	174.371.600.400	101,93%
24	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	48.526.000.000	49.458.456.600	101,92%
25	KAB. MAJALENGKA	111.472.000.000	113.582.899.100	101,89%
26	KAB. PURWAKARTA	120.713.000.000	122.229.680.200	101,26%
27	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	215.271.000.000	217.837.782.300	101,19%
28	KAB. KARAWANG	359.847.000.000	362.419.671.000	100,71%
29	KAB. TASIKMALAYA	90.353.000.000	90.740.611.800	100,43%
30	KAB. BEKASI CKRG	833.220.000.000	834.154.907.950	100,11%
31	KOTA CIMAHI	160.415.000.000	160.474.882.050	100,04%
32	KOTA BANDUNG III SOETA	411.733.000.000	405.461.299.200	98,48%
33	KOTA BANDUNG II KWLYN	460.088.000.000	448.652.135.600	97,51%
34	KOTA BANDUNG I PJJRN	453.124.000.000	441.311.568.700	97,39%
Grand Total		**8.034.519.000.000**	**8.174.357.408.900**	**101,74%**

b. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 104,56% atau sebesar Rp.6,300 triliun dari target sebesar Rp.6,026 triliun, pencapaian ini lebih dipengaruhi oleh kenaikan tariff BBNKB-I dari 10% menjadi 12,5% yang mulai diterapkan pada bulan April 2019.

Capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	CABANG	BBNKB I		
		TARGET	REALISASI	%
1	KAB. SUKABUMI II P.RATU	47.317.000.000	52.402.487.500	110,75%
2	KOTA SUKABUMI	41.648.000.000	45.503.095.000	109,26%
3	KAB. CIREBON I SBR	132.087.000.000	143.036.269.000	108,29%
4	KAB. INDRAMAYU I	108.643.000.000	117.456.677.500	108,11%
5	KAB. BOGOR (CIBINONG)	583.646.000.000	626.217.466.300	107,29%
6	KAB. SUBANG	142.223.000.000	151.903.805.000	106,81%
7	KOTA CIREBON	69.596.000.000	74.284.917.500	106,74%
8	KAB. SUKABUMI I CBDK	106.301.000.000	113.221.965.000	106,51%
9	KAB. MAJALENGKA	75.397.000.000	80.167.962.500	106,33%
10	KAB. CIAMIS I	45.898.000.000	48.767.417.500	106,25%
11	KAB. PURWAKARTA	101.695.000.000	107.954.865.000	106,16%

NO	CABANG	BBNKB I		
		TARGET	REALISASI	%
12	KAB. CIANJUR	128.321.000.000	136.168.457.500	106,12%
13	KAB. GARUT	104.144.000.000	110.123.110.000	105,74%
14	KAB. CIAMIS II PGDRN	14.576.000.000	15.391.052.500	105,59%
15	KOTA TASIKMALAYA	58.740.000.000	61.986.420.000	105,53%
16	KOTA BANDUNG II KWLYN	237.805.000.000	250.720.611.000	105,43%
17	KAB. BEKASI CKRG	665.610.000.000	701.286.825.000	105,36%
18	KAB. KUNINGAN	67.944.000.000	71.577.920.000	105,35%
19	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	48.249.000.000	50.508.652.500	104,68%
20	KOTA BOGOR	204.456.000.000	211.912.137.500	103,65%
21	KOTA CIMAHI	96.955.000.000	100.153.882.500	103,30%
22	KOTA BANDUNG I PJJRN	236.217.000.000	243.634.417.500	103,14%
23	KAB. KARAWANG	325.593.000.000	335.729.797.500	103,11%
24	KAB. BANDUNG II SOREANG	175.993.000.000	180.664.775.000	102,65%
25	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	194.195.000.000	198.683.775.000	102,31%
26	KAB. CIREBON II CLDG	55.795.000.000	57.001.912.500	102,16%
27	KOTA DEPOK I	300.758.000.000	307.196.960.000	102,14%
28	KAB. SUMEDANG	67.677.000.000	69.072.062.500	102,06%
29	KOTA BANJAR	11.976.000.000	12.201.310.000	101,88%
30	KOTA BEKASI	772.458.000.000	786.570.780.000	101,83%
31	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	171.851.000.000	174.643.115.000	101,62%
32	KOTA DEPOK II CINERE	168.975.000.000	171.386.340.000	101,43%
33	KAB. TASIKMALAYA	63.386.000.000	64.167.725.000	101,23%
34	KOTA BANDUNG III SOETA	250.700.000.000	253.774.905.000	101,23%
Grand Total		**5.876.825.000.000**	**6.125.473.871.300**	**104,23%**

Capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	CABANG	BBNKB II		
		TARGET	REALISASI	%
1	KAB. SUKABUMI II P.RATU	712.000.000	966.707.500	135,77%
2	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	2.845.000.000	3.760.968.700	132,20%
3	KAB. GARUT	2.045.000.000	2.694.697.100	131,77%
4	KAB. SUBANG	1.577.000.000	2.057.289.300	130,46%
5	KOTA BANDUNG I PJJRN	5.060.000.000	6.552.773.000	129,50%
6	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	557.000.000	719.834.000	129,23%
7	KOTA SUKABUMI	948.000.000	1.217.984.500	128,48%
8	KAB. INDRAMAYU I	1.942.000.000	2.482.432.100	127,83%

NO	CABANG	BBNKB II		
		TARGET	REALISASI	%
9	KOTA BANDUNG II KWLYN	5.308.000.000	6.735.862.800	126,90%
10	KOTA BANDUNG III SOETA	6.028.000.000	7.629.746.000	126,57%
11	KAB. TASIKMALAYA	1.461.000.000	1.839.968.500	125,94%
12	KAB. BANDUNG II SOREANG	3.462.000.000	4.348.385.300	125,60%
13	KAB. CIREBON I SBR	2.734.000.000	3.386.688.000	123,87%
14	KOTA BOGOR	5.214.000.000	6.404.235.500	122,83%
15	KAB. PURWAKARTA	1.810.000.000	2.221.286.500	122,72%
16	KOTA CIMAHI	2.263.000.000	2.774.269.300	122,59%
17	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	3.561.000.000	4.350.946.000	122,18%
18	KAB. CIAMIS II PGDRN	568.000.000	689.524.000	121,40%
19	KOTA CIREBON	1.637.000.000	1.979.714.500	120,94%
20	KAB. CIAMIS I	1.954.000.000	2.360.859.300	120,82%
21	KAB. KARAWANG	5.346.000.000	6.443.278.000	120,53%
22	KAB. SUKABUMI I CBDK	1.660.000.000	1.993.209.500	120,07%
23	KAB. SUMEDANG	1.465.000.000	1.754.901.000	119,79%
24	KOTA TASIKMALAYA	1.773.000.000	2.112.650.500	119,16%
25	KAB. CIREBON II CLDG	1.090.000.000	1.292.088.000	118,54%
26	KAB. MAJALENGKA	2.076.000.000	2.420.087.600	116,57%
27	KAB. CIANJUR	2.343.000.000	2.717.105.000	115,97%
28	KOTA BANJAR	483.000.000	559.959.000	115,93%
29	KAB. BOGOR (CIBINONG)	12.126.000.000	13.901.990.000	114,65%
30	KAB. KUNINGAN	2.346.000.000	2.676.456.000	114,09%
31	KOTA DEPOK I	11.622.000.000	13.127.323.000	112,95%
32	KOTA BEKASI	27.845.000.000	30.943.450.000	111,13%
33	KOTA DEPOK II CINERE	5.948.000.000	6.597.855.500	110,93%
34	KAB. BEKASI CKRG	21.440.000.000	23.592.923.600	110,04%
Grand Total		**149.249.000.000**	**175.307.448.600**	**117,46%**

c. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.2,616 triliun atau 102,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2,563 triliun.

Over target penerimaan PBBKB Tahun 2019 sebesar 2,06% disebabkan adanya penyesuaian harga BBM pada awal tahun 2019 yaitu tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 10 Februari 2019 untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang rata-rata mengalami kenaikan dan adanya tambahan penerimaan dari

Wajib Pungut PBBKB baru untuk sektor transportasi, serta ditopang dengan stabilnya harga minyak mentah dunia.

Capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA P3D	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA TASIKMALAYA	41.145.751.000	52.553.008.878	127.72%
2	KAB. GARUT	64.254.458.000	72.577.188.588	112.95%
3	KAB. MAJALENGKA	54.620.391.000	61.019.110.970	111.71%
4	KAB. SUMEDANG	55.748.431.000	61.878.132.615	111.00%
5	KAB. BANDUNG II SOREANG	127.596.614.000	140.769.042.158	110.32%
6	KOTA BANJAR	14.937.107.000	16.459.233.837	110.19%
7	KAB. KARAWANG	181.463.848.000	199.324.335.473	109.84%
8	KAB. BOGOR CIBINONG	255.536.809000	280.616.787.800	109.81%
9	KAB. INDRAMAYU I	76.138.923.000	83.605.163.752	109.81%
10	KAB. KUNINGAN	34.649.058.000	38.015.176.121	109.71%
11	KOTA CIREBON	28.152.360.000	30.883.946.532	109.70%
12	KAB. TASIKMALAYA SUKARAJA	41.145.751.000	44.960.685.392	109.27%
13	KAB. CIANJUR	72.773.786.000	79.509.500.285	109.26%
14	KAB. SUBANG	77.479.145.000	84.550.652.942	109.13%
15	KAB. BEKASI CIKARANG	218.460.507.000	238.202.825.427	109.04%
16	KAB. CIAMIS II PGDRN	19.517.222.000	21.177.006.603	108.50%
17	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	51.251.733.000	55.577.070.959	108.44%
18	KOTA DEPOK I	123.007.376.000	133.385.500.281	108.44%
19	KOTA BOGOR	70.588.601.000	76.332.059.630	108.14%
20	KOTA SUKABUMI	33.064.729.000	35.670.451.626	107.88%
21	KOTA CIMAHI	42.348.849.000	45.627.464.971	107.74%
22	KAB. CIAMIS I	43.311.323.000	46.627.701.667	107.66%
23	KAB. SUKABUMI I CBDK	67.705.258.000	72.821.738.918	107.56%
24	KAB. PURWAKARTA	80.993.109.000	86.927.646.542	107.33%
25	KOTA BANDUNG III SOETA	213.033.565.000	228.618.780.457	107.32%
26	KAB. CIREBON I SUMBER	102.756.311.000	109.733.236.046	106.79%
27	KOTA BEKASI	205.044.458.000	218.610.593.450	106.62%
	TOTAL	**2.406.184.651.000**	**2.616.034.041.920**	**108.72%**

d. PAJAK AIR PERMUKAAN

Realisasi Pajak Air Permukaan sebesar Rp.55,663 miliar dari target sebesar Rp.60 miliar atau 92,77%, Ketidaktercapaian penerimaan pajak air permukaan disebabkan tidak terealisasinya penerimaan dari PJT-II yang sudah disepakati sebelumnya, disamping banyaknya perusahaan yang habis ijin usahanya (SIPPA) sehingga dinas teknis tidak bisa diterbitkan NPA.

Capaian Pajak Air Permukaan per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA P3D	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)		
		TARGET	REALISASI	%
1	KAB. KUNINGAN	103.037.000	486.144.600	471.82%
2	KAB. CIREBON II CLDG	50.789.000	167.427.600	329.65%
3	KAB. BANDUNG I RC. EKEK	1.176.611.000	1.979.616.100	168.25%
4	KOTA BEKASI	624.819.000	1.038.640.100	166.23%
5	KAB. BOGOR (CIBINONG)	2.549.094.000	3.938.506.996	154.51%
6	KAB. CIREBON I SBR	125.631.000	182.344.300	145.14%
7	KOTA BOGOR	277.362.000	361.779.400	130.44%
8	KAB. KARAWANG	5.090.549.000	6.371.562.400	125.16%
9	KAB. CIANJUR	2.014.763.000	2.493.711.555	123.77%
10	KAB. BEKASI CIKARANG	4.848.977.000	5.982.218.700	123.37%
11	KAB. CIAMIS	65.972.000	80.461.700	121.96%
12	KAB. MAJALENGKA	135.344.000	162.940.500	120.39%
13	KOTA CIMAHI	304.234.000	361.501.300	118.82%
14	KAB. CIAMIS PANGANDARAN	5.766.000	6.850.000	118.80%
15	KOTA DEPOK II CINERE	58.856.000	69.758.300	118.52%
16	KAB. SUMEDANG	1.054.230.000	1.167.342.535	110.73%
17	KOTA BANDUNG II SOETA	26.783.000	29.207.800	109.05%
18	KAB. INDRAMAYU	208.566.000	227.108.600	108.89%
19	KAB. TASIKMALAYA SUKARAJA	131.583.000	136.775.100	103.93%
20	KAB. PURWAKARTA	10.771.057.000	11.166.056.055	103.67%
21	KOTA BANJAR	47.136.000	48.489.800	102.87%
22	KOTA DEPOK	184.846.000	189.522.900	102.53%
23	KOTA BANDUNG II KWLYN	384.659.000	392.916.265	102.15%
24	KOTA BANDUNG I PJJRN	35.525.000	35.788.900	100.74%
25	KAB. SUKABUMI I CBDK	1.259.951.000	1.255.792.000	99.67%
26	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	13.531.208.000	13.416.205.115	99.15%
27	KAB. GARUT	548.143.000	538.158.700	98.18%
28	KOTA TASIKMALAYA	15.579.000	15.144.600	97.21%
29	KAB. BANDUNG II SOREANG	2.683.306.000	2.449.832.100	91.30%
30	KAB. SUBANG	551.519.000	500.879.300	90.82%
31	KAB. SUKABUMI II P.RATU	593.199.000	458.233.415	77.25%
32	KOTA SUKABUMI	1.539.000	294.000	19.10%
	JUMLAH	*50.000.000.000*	*55.711.190.736*	*111.42%%*

e. PAJAK ROKOK

Realisasi penerimaan Pajak Rokok tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp.2,479 triliun atau 97,65% dari target APBD Perubahan sebesar Rp.2,539 triliun, ketidaktercapaian penerimaan pajak rokok dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, sehingga penerimaan pajak rokok yang diterima di RKUD hanya sebesar Rp.2,479 triliun, dari yang seharusnya diterima sebesar Rp.2,578 triliun, sebagai dampak dari adanya potongan untuk kontribusi dukungan jaminan kesehatan (menutupi difisit BPJS kesehatan) dari beberapa kabupaten/kota sebesar Rp.99,033 miliar.

Capaian Pajak Rokok per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut

NO	NAMA P3D	REALISASI
1	KAB. BOGOR (CIBINONG)	257.432.489.701
2	KAB. BANDUNG	174.034.810.102
3	KAB. BEKASI CIKARANG	150.668.787.598
4	KAB.SUKABUMI I CIBADAK	146.623.976.770
5	KOTA BANDUNG I PJJRN	140.342.237.254
6	KAB.CIANJUR	129.115.680.532
7	KAB.KARAWANG	127.428.545.778
8	KAB.GARUT	123.911.484.377
9	KAB..CIREBON I SUMBER	122.222.911.790
10	KOTA BEKASI	116.625.211.026
11	KAB. INDRAMAYU	106.817.201.838
12	KOTA DEPOK	105.092.508.747
13	SUKARAJA	94.977.717.078
14	KAB. BANDUNG	86.906.100.352
15	KAB.SUBANG	73.654.366.158
16	KAB.MAJALENGKA	72.087.385.039
17	KAB.CIAMIS	70.832.697.005
18	KAB.KUNINGAN	63.312.569.549
19	KAB.SUMEDANG	62.328.154.069
20	KOTA BOGOR	58.710.856.820
21	KAB.PURWAKARTA	52.540.231.469
22	KOTA TASIK	40.596.267.485
23	KOTA CIMAHI	28.818.455.064
24	KAB.PANGANDARAN	23.948.954.629
25	KOTA SUKABUMI	19.570.735.993
26	KOTA CIREBON	19.190.743.086
27	KOTA BANJAR	11.677.151.001
	TOTAL	***2.479.468.228.309***

2. RETRIBUSI DAERAH

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.56,239 miliar atau 105,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.53,183 miliar. Secara umum ketercapaian retribusi daerah dipengaruhi oleh :

a. Adanya peningkatan mutu pelayanan dan keberhasilan mempertahankan akreditasi sehingga tumbuhnya kepercayaan konsumen terhadap institusi yang memberikan pelayanan public dengan terakredisasinya layanan yang dikeluarkan oleh KAN;
b. Terdapat diversifikasi layanan;
c. Tarif retribusi sangat terjangkau oleh masyarakat, karena tariff retribusi mayoritas ditetapkan lebih rendah dari tariff layanan yang sama yang diberikan oleh perusahaan Swasta;
d. Terdapat peningkatan frekwensi pemakaian Bandara Nusawiru, diantaranya penerbangan ujicoba pesawat N219 oleh PT. Dirgantara Indonesia dan Drone Rajawali oleh PT. Bhineka Dwi Perkasa.
e. Berhasilnya program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan perangkat daerah khususnya Dinas Bina Marga melalui pelaksanaan pertukaran data pemasangan reklame di ruas jalan milik provinsi.
f. Terdapat rasionalisasi populasi ternak, yaitu penjualan ternak yang disebabkan oleh dikuranginya anggaran operasional/pakan ternak.
g. Terdapat peningkatan penjualan susu pasteurisasi setelah dilakukan kerjasama dengan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat

Sekalipun secara total capaian melebihi target yang ditetapkan, namun apabila dilihat rincian terdapat dua jenis retribusi yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disebabkan kurangnya animo masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata di tahun politik, banyaknya hari libur/cuti bersama yang panjang mengakibatkan masyrakat lebih banyak menghabiskan masa liburannya di kampung halaman dan adanya info kerawanan bencana alam (gempa) di beberapa kawasan bandung utara, sementara ketidaktercapaian penerimaan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang disebabkan menurunnya penggunaan tenaga Kerja Asing.

3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.386,442 miliar atau sebesar 99,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.387,109 miliar, dipengaruhi oleh BUMD yang tidak dapat memberikan kontribusi terhadap APBD Tahun 2019, yaitu PT. Jasa Sarana yang mempunyai masalah likuiditas keuangan, dan peralihan direksi yang terjadi dipenghujung tahun anggaran sehingga direksi baru tidak dapat mengeksekusi kewajiban penyetoran dividen.

Namun demikian, secara umum pencapaian kinerja perusahaan daerah lainnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kontribusi terbesar berasal dari dividen PT. BJB, sebesar Rp.335,823 miliar atau 86,75% dari total penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara PT. BPR mencapai Rp.8 miliar lebih, yang disebabkan adanya setoran piutang dividen PT. BPR di wilayah Kabupaten Cirebon yang tertunda sejak tahun 2015–2018 dengan total nominal setoran mencapai Rp.1,657 miliar.

4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Capaian realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.1,453 triliun atau 114,38% dari target perubahan sebesar Rp.1,270 triliun. Ketercapaian pendapatan lain-lain PAD yang Sah dipengaruhi :

a. Adanya penjualan bekas bangunan yang sulit dilakukan penetapan target pendapatannya;
b. Adanya keterlambatan penyerapan anggaran belanja yang berakibat pendapatan jasa giro melampaui target;
c. Pendapatan dari pengelolaan sampah regional, penetapan targetnya sangat bergantung pada alokasi anggaran dalam masing-masing APBD Kabupaten/Kota, sehingga perubahan APBD Kab/Kota diakhir tahun tidak terakomodir oleh rencana pendapatan APBD Provinsi Jawa Barat.
d. Pendapatan dari pemanfaatan aset milik daerah dan BLUD yang telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun demikian, dari beberapa rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, terdapat satu kodering Pendapatan yang tidak mencapai target yaitu pendapatan denda Pajak, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah Provinsi yang membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB pada bulan November – Desember 2019.

B. DANA PERIMBANGAN

Realisasi dana perimbangan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp.14,715 triliun atau 97,35% dari target sebesar Rp.15,115 triliun, yang terakumulasi dari ketidaktercapaian dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi khusus.

1. DBH Pajak/Bukan Pajak

Secara umum realisasi DBH pajak/bukan pajak hanya sebesar Rp.1,483 triliun atau 95,51% dari target perubahan sebesar Rp.1,553 triliun, yang disesuaikan dengan ketidaktercapaian penerimaan pajak/bukan pajak secara nasional dan kondisi/kemampuan keuangan negara dengan segala kebijakan penyalurannya.

a. Realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.1,150 triliun atau 94,42% dari target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp.1,218 triliun, ketidaktercapaian penerimaan bagi hasil pajak dipengaruhi oleh ketidaktercapaian Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 sebagai dampak

dari tidak tercapainya penerimaan negara yang bersumber dari PPh, dimana capaian penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan secara nasional berada dikisaran Rp.668,61 triliun atau 74,75% dari target APBN sebesar Rp.894,45 triliun. Hal ini berdampak pada kepada realisasi penyaluran DBH PPh secara reguler dikisaran 60,53% dari pagu alokasi sebagaimana PMK No. 180/PMK.07/2019 tentang Perubaan rincian DBH dan penyaluran DBH triwulan IV tahun 2019.

b. Begitu pula realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.333,721 miliar atau sebesar 99,47% dari target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp.335,498 miliar. Ketidaktercapaian tersebut merupakan dampak dari penerimaan negara yang bersumber dari minyak bumi dan gas bumi yang masih sangat rentan terhadap kondisi ekonomi global, terutama rendahnya harga migas dunia yang masih belum stabil sampai dengan penghujung tahun 2019.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Realisasi Penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100%, telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp.3,212 triliun.

3. Dana Alokasi Khusus

   Realisasi Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.10,018 triliun atau 96,81% dari target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp.10,349 triliun. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh realisasi DAK Non Fisik dari jenis penerimaan Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, Dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM serta dana pelayanan adminduk yang tidak disalurkan 100% mengingat penyaluran disesuaikan dengan progres pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp.78,256 miliar atau sebesar 100,33% telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp.77,999 miliar, baik yang bersumber dari penerimaan hibah PT Jasa Raharja, transfer dana insentif daerah maupun bantuan keuangan dari Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, terjadi pelampauan target dari hibah pemerintah untuk program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif terpadu.

3.6.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tercapainya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dtunjang sepenuhnya oleh kinerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat yang secara operasional dilakukan oleh Kantor-Kantor Sistem Administrasi Manunggal Saui Atap (SAMSAT) yang tersebar di 34 Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat dengan alamat dibawah ini :

NO.	P3D	ALAMAT
1	Wilayah Kota Depok I	Jl. Merdeka Raya No. 2 Depok 16411,No.Telp (021) 7717528 / No.Fax : (021) 7717528
2	Wilayah Kota Depok II Cinere	Jl. Limo Raya No. 60 Cinere, No.Telp (021) 753729 / No.Fax : (021) 753729
3	Wilayah Kab. Bogor	Jl. Raya Jakarta – Bogor KM. 50 Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. No. Telp (021) 8758925 / No.Fax : (021) 8758924
4	Wilayah Kota Bogor	Alamat :Jl. Ir. Djuanda No 4 Bogor, No.Telp (0251) 8322283 / No.Fax : (0251) 8322283
5	Wilayah Kota Sukabumi	Alamat: Jl. Masjid No. 22, Kota Sukabumi, No.Telp (0266) 215394 / No.Fax : (0266) 221911
6	Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak	Alamat: Jl.Raya Sukabumi-Bogor KM 20, Cibadak - Sukabumi,No.Telp : (0266)536780 / No.Fax : (0266)536780
7	Wilayah Kab. Sukabumi II Palabuhan Ratu	Jl. Jend.Sudirman Komplek Perkantoran Pemda — Pelabuhan Ratu, Sukabumi, No.Telp : (0266) 434225 / No.Fax : (0266) 434225
8	Wilayah Kab. Cianjur	Jl. DR. Murwadi No. 118 Cianjur, No.Telp: (0263) 260463 / No.Fax : (0263) 260463.
9	Wilayah Kota Bekasi	Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal) Bekasi 17113, No.Telp: (021)82651666, (021)82651669/Fax : (021) 86251667
10	Wilayah Kab. Bekasi — Cikarang	Jl. Industri No. 14, Pasir Gombong, Cikarang Bekasi 17550, No.Telp: (021) 89109169 / No.Fax : (021) 89109169.
11	Wilayah Kab. Karawang	Jl. A. Yani By Pass No. 98, Karawang 41312, No.Telp : (0267) 402656 / No.Fax : (0264) 402656.
12	Wilayah Kab. Purwakarta	Jl. mekarsari I no .33 kel. Purwamekar kec. Purwakarta
13	Wilayah Kab. Subang	Jl. KS. Tubun No. 19 Subang, No.Telp : (0260) 411026 / No.Fax : (0260) 41102.
14	Wilayah Kota. Cirebon	Jl. Pemuda No. 44, Cirebon, No.Telp : (0231) 247706 / No.Fax : (0231) 24706
15	Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	Jl. Sunan Drajat No.11, Cirebon, No.Telp: (0231) 321434 / No.Fax : (0231) 321434
16	Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	Jl. Raya Kuningan – Losari KM 39,5 Bojongnegara, Ciledug, No.Telp: (0231) 8665144 / No.Fax : (0231) 8665144
17	Wilayah Kab. Indramayu I	Jl.Gatot Subroto, Indramayu, No.Telp: (0234) 274301 / No.Fax : (0234) 274301
18	Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	Jl.Jend.Sudirman No.01, Indramayu, No.Telp: (0234) 742750/ No.Fax : (0234) 742750.
19	Wilayah Kab. Kuningan	Jl. Aruji Kartawinata No. 8, Kuningan, No.Telp : (0232) 876071/ No.Fax : (0232) 871576
20	Wilayah Kab. Majalengka	Jl. KH. Abdul Halim No. 88 Majalengka, No.Telp: (0233) 281410/Fax. (0233) 281410.
21	Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jl. Pajajaran No.88 Bandung, No.Telp (022) 6021802/ No.Fax : (022) 6021879/6021887
22	Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Jl. Kawaluyaan Raya Jatisari, Bandung, No.Telp : (022) 732 0869/ No.Fax : (022) 732 0869.

NO.	P3D	ALAMAT
23	Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jl.Soekarno Hatta No.528 Bandung, No.Telp : (022)-7563998 / No,Fax : (022) 7500240.
24	Wilayah Wil.Kab. Bandung Barat	Jl. Raya Cimareme No. 203 B, Bandung Barat, No.Telp: (022) 6621010 / No.Fax : (022) 6621010
25	Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	Jl. K.H. Ahmad Syadili No. 66, Cipasir, Rancaekek, No.Telp: (022) 7793817 Fax : (022) 7793817
26	Wilayah Kab.Bandung II Soreang	Jl.Gading Tutuka No.01, No.Telp (022) 85870534 / No.Fax : (022) 85870585/ 85870498
27	Wilayah Kab.Sumedang	Jl. Pari Lama RT.04 RW. 08 Kel. Situ Kec. Sumedang UTARA KAB. SUMEDANG
28	Wilayah Kab.Garut	Jl. Suherman No. 65 Tarogong Kidul, Garut, No.Telp: (0262) 233816/ No.Fax : (0262) 233816
29	Wilayah Kota Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda (By Pass) Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 335107 / No.Fax : (0265) 335107
30	Wilayah Kab. Tasikmalaya	Jl. Raya Cikatomas Sukaraja Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 566917/ No.Fax : (0265) 566917
31	Wilayah Kab.Ciamis	Jl. Jendral Sudirman No. 231, Ciamis, No.Telp: 0265 – 771573/ No.Fax : (0265) 773656
32	Wilayah Kab.Pangandaran	Jl. Raya Pangandaran Parigi KM. 2 Pangandaran, No.Telp: (0265) 639331 / No.Fax : (0265) 639331
33	Wilayah Kota Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.331A,Cimahi, No.Telp : (022) 6645095 / No.Fax : (022) 6645095
34	Wilayah Kota Banjar	Jl. Gerilya Pamongkoran Telp (0265) 744627 Fax (0265) 744627 / 747133

Selain Samsat Induk yang tersebar di seluruh Jawa Barat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga dilakukan melalui sentra – sentra layanan lainnya yang dari tahun ke tahun terus berinovasi untuk semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Innovasi Layanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Samsat Keliling

Samsat Outlet

Samsat Online 3 Provinsi

Samsat Drive Thru

Network Monitoring System

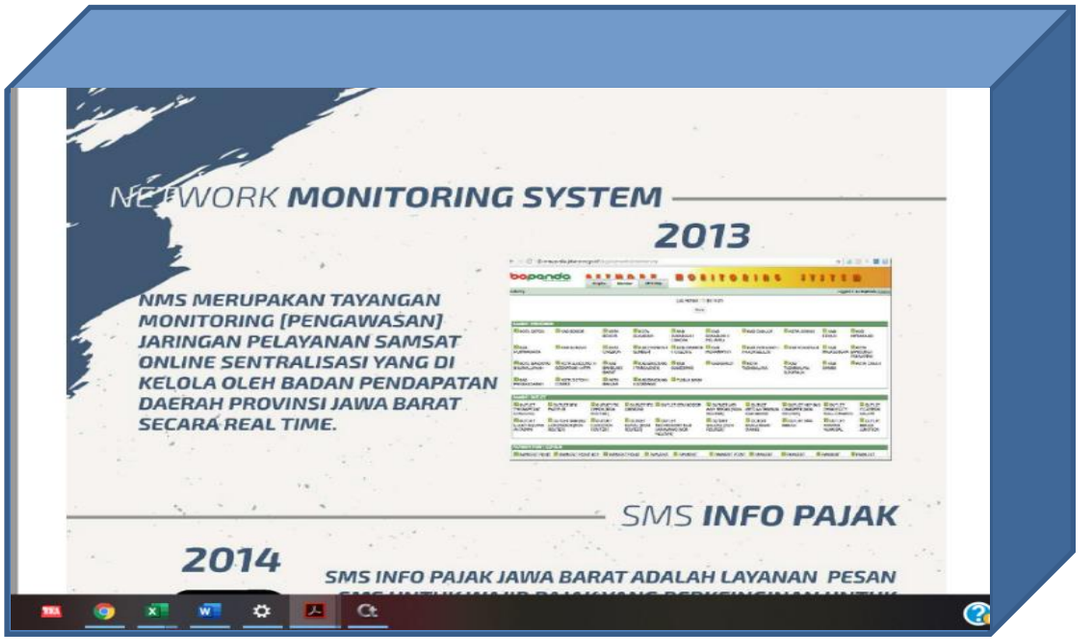

SMS Infor Pajak

E-Samsat

Samsat Gendong

Samsat Stiker Barcode

Tabungan Samsat (T-Samsat)

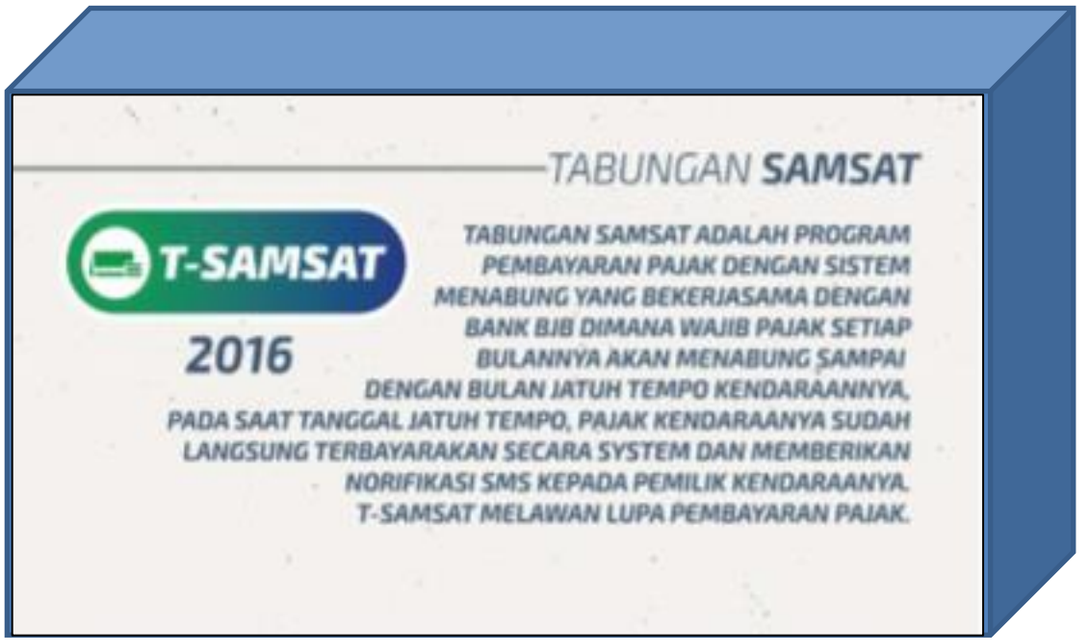

Sipandu

Sambara

Aplikasi Penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor (AP2KB)

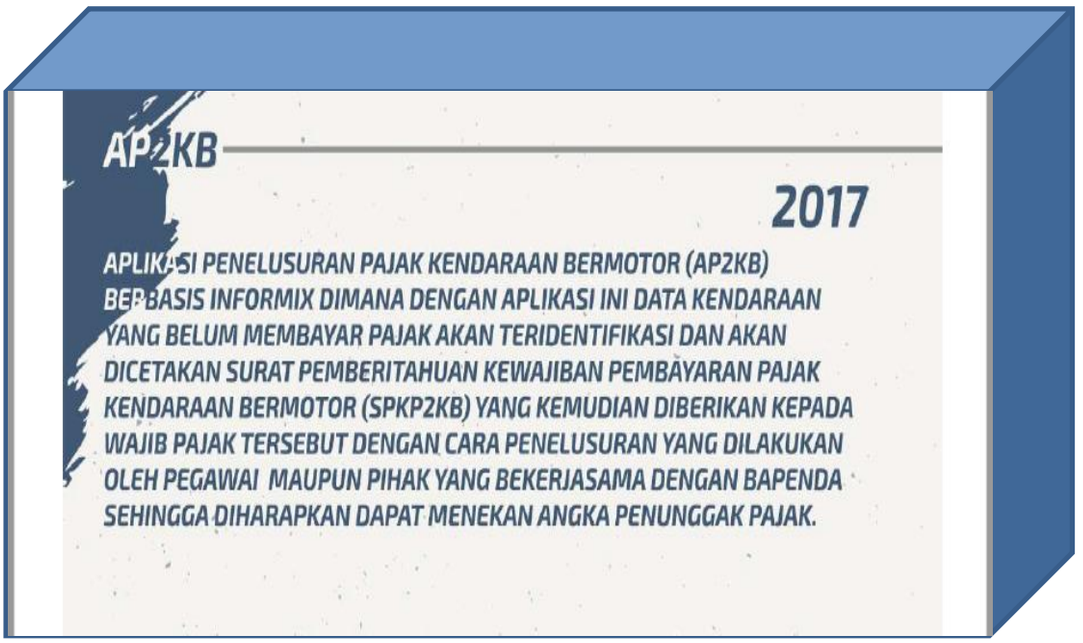

Sipaten

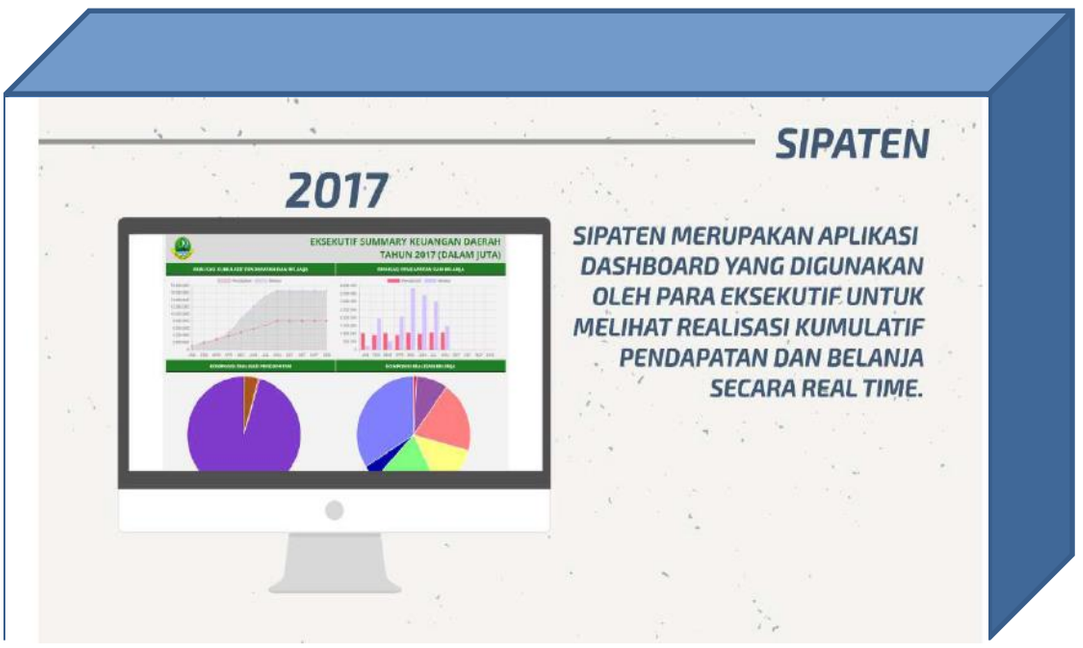

EDC Samsat

Samping Ketepel

Samsat Online Nasional (Samolnas)

Samsat J'bret

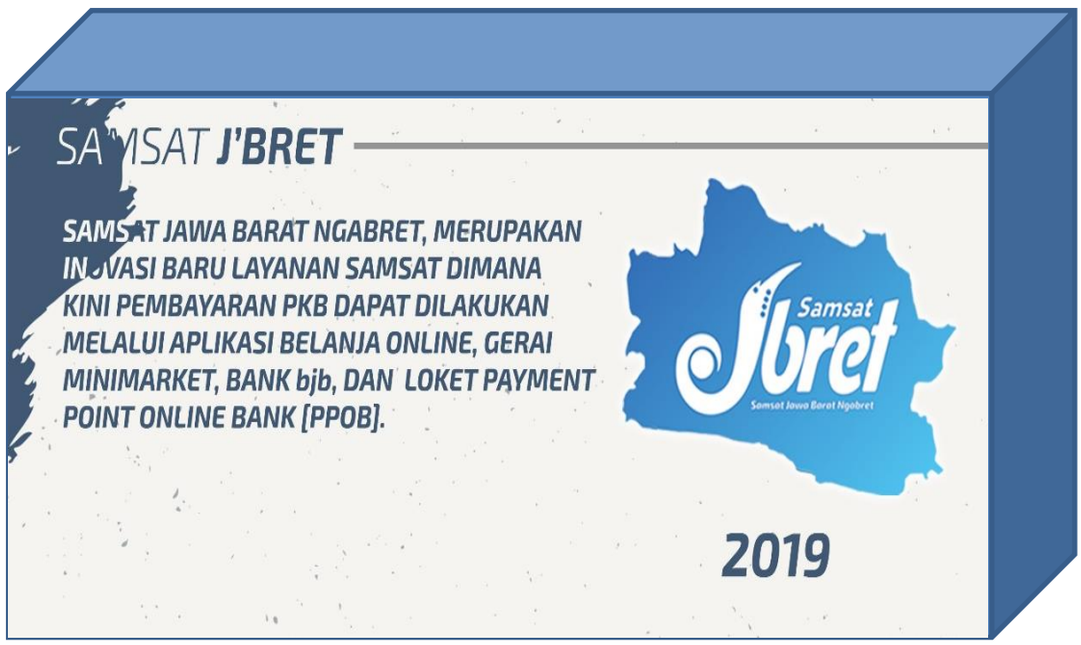

Atos Pamor & Zonita Pamor

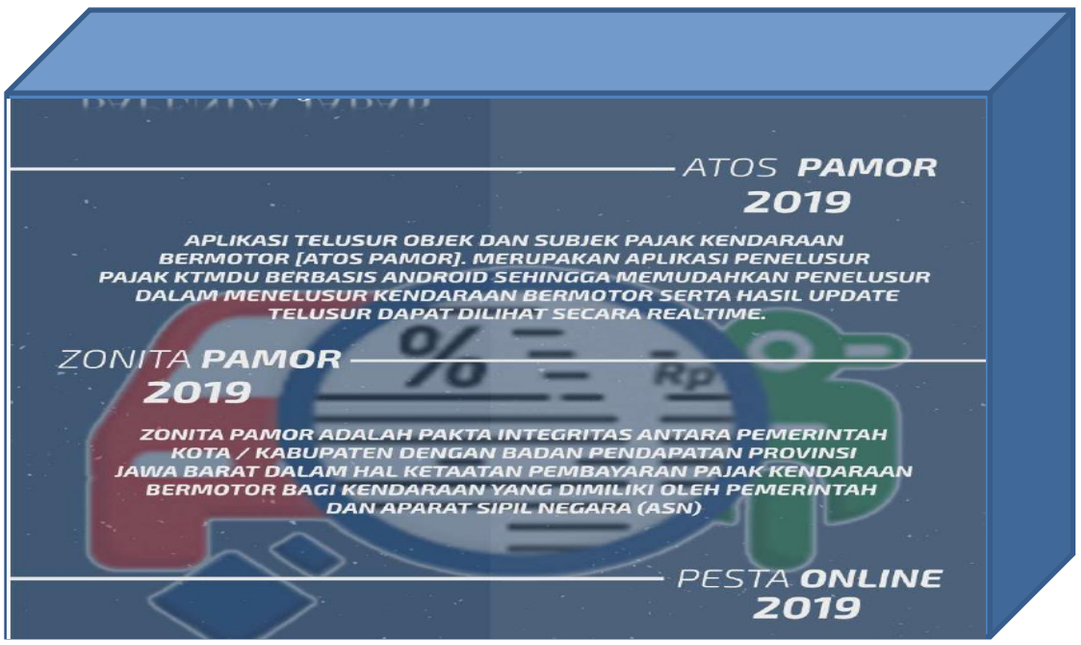

Pesta Online

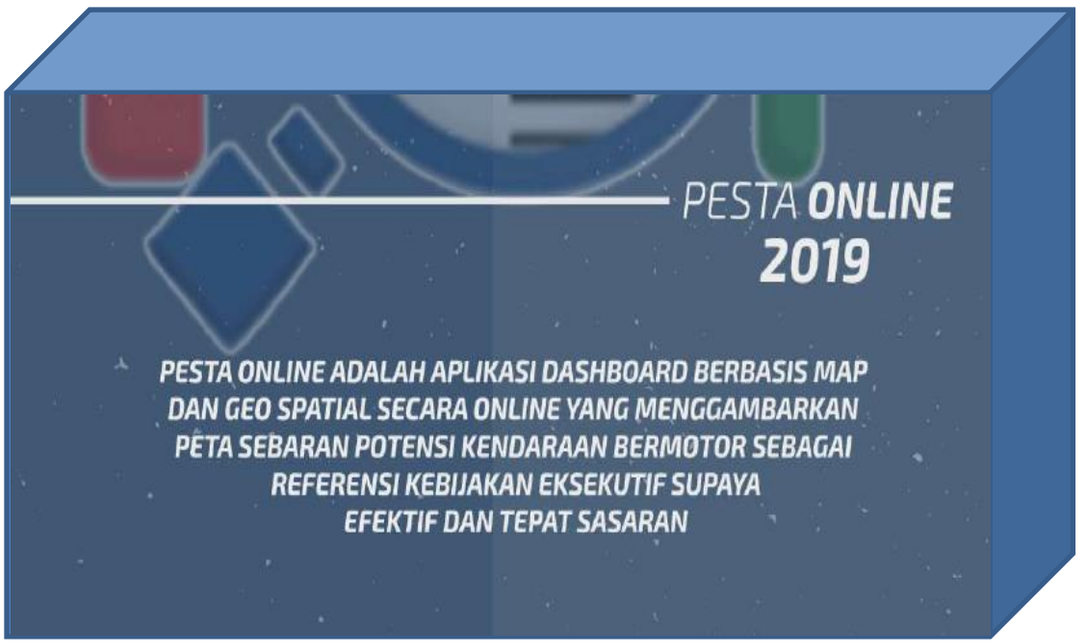

3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	103.025	92,53	10,38%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	102,19	94,44	7,58%

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 27.779.507.852,00 terealisasi sebesar Rp. 25.705.244.971,00 atau sebesar 92.53% dapat menghasilkan output capaian kinerja sebesar 103.025% sehingga berdasarkan perhitungan tabel analisis efisiensi sumber daya jumlah efisiensinya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\%\ \text{Capaian Kinerja} - \%\ \text{Penyerapan Anggaran})}{\%\ \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{103{,}25 - 92{,}53}{103{,}25} \times 100\%$$

= 10,38%

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda” didukung oleh Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.582.840.341,00 terealisasi sebesar Rp. 6.216.720.592,00 atau sebesar 94,44% dapat menghasilkan output capaian kinerja sebesar 102,19% sehingga berdasarkan perhitungan tabel analisis efisiensi sumber daya jumlah efisiensinya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\%\ \text{Capaian Kinerja} - \%\ \text{Penyerapan Anggaran})}{\%\ \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{102{,}19 - 94{,}44}{102{,}19} \times 100\%$$

= 7.58%

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapata Daerah Provinsi Jawa Barat sudah sudah berjalan dengan efektif dan efisien, karena capaian kinerjanya sudah melampaui target tetapi penyerapan anggaran masih terdapat efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori sangat memuaskan yaitu berada di atas 100%. Keberhasilan capaian kinerja tesebut didukung oleh kerjasama yang sinergis dari seluruh unit kerja baik yang ada di Kantor Pusat, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) se-Jawa Barat dan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD)

Namun demikian di balik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimana harus dicarikan solusinya secara terus menerus diantaranya adalah :

a. Masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU);
b. Masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor;
c. Masih tingginya jumlah WP PAP Pasif;
d. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki SIPPA;
e. Belum optimalnya layanan pajak daerah;
f. Belum akuratnya data potensi kendaraan bermotor;
g. Terdapatnya perubahan kebijakan tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Pemerintah Pusat;
h. Tidak sesuainya realisasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat;
i. Masih terdapatnya Badan Usaha yang belum menjadi Wajib Pungut PBBKB;
j. Masih terdapatnya Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum termanfaatkan untuk menghasilkan PAD;
k. Masih terdapatnya BUMD yang belum berkontribusi optimal terhadap PAD;
l. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
m. Masih kurang efektifnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil dan instansi terkait lainnya;
n. Masih kurang optimalnya kerja sama pengelolaan pendapatan dengan *stakeholders* yang terkait.
o. Belum optimalnya kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan;
p. Masih adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian pelayanan;
q. Masih adanya ketidakjelasan biaya/tarif pelayanan;
r. Masih adanya ketidakjelasan produk spesifikasi jenis pelayanan;